

**DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN
2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG
BERALIH PROFESI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ILHAM MAKRUH SAFII
NIM.162.111.329

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA
2020**

**DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN
2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG
BERALIH PROFESI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

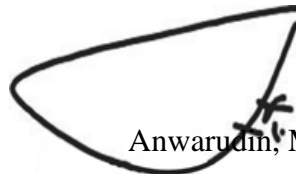
Disusun Oleh:

ILHAM MAKRUH SAFII
NIM.162.111.329

Surakarta, 08 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Anwarudin, M.H.I

NIP: 19720812 200501 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ILHAM MAKRUF SAFII

NIM : 162.111.329

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Oktober 2020



Ilham Makruf Safii

Anwarudin, M.H.I

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ilham Makruf Safii

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ilham Makruf Safii, NIM : 162111344 yang berjudul : **“DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)”** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Anwarudin, M.H.I

NIP: 19720812 200501 1 009

PENGESAHAN

“DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)”.

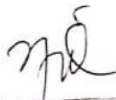
Disusun oleh :

ILHAM MAKRUF SAFII

NIM.162.111.329

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Senin, 19 Oktober 2020/ 2 Rabiul Awal 1442 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Hj. Hafidah, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730318 199803 2 004

Penguji II



H. Shofakhuddin Sirizar, M.A.
NIP. 19720610 200312 1 011

Penguji III



Siti Rokhaniyah, S.E., M.Sc.
NIP. 19880220 20171 2 168

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 00

MOTTO

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

*“Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap".
Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.”*

(QS. Al-Isra' Ayat 81)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupan ku, khususnya untuk:

Dalam perjuangan meniti cita-cita dengan semangat, doa, dan keteguhan hati serta kerja keras, saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, pengertian, dan mencintai saya, khususnya untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta Alm. Bapak Wagimin dan Ibu Ngadinem yang telah memberiku cinta dan kasih sayang dan do'a yang tak ada hentinya.
2. Kakak pertamaku Gunasri dan keluarga, Kakak keduku Wartini dan Keluarga, kakak Ketigaku Tri Wahyuni dan keluarga, kakak ke-empatku Sumarsih dan Jarno sekeluarga yang selalu memberi semangat dan mendoakaku.
3. Bapa K.Lasdi Miftahul Huda dan Keluarga yang telah membimbing dan mendidiku di Pondok Pesantren Al-Hikmah.
4. Segenap keluarga besar UTPK dan MAHASINTAWATI Kabaupaten Sragen yang telah membantu baik materil maupun immateril.
5. Sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) kelas HES I 2016 yang memberikan semangat, dukungan dan motivasi.
6. Almamater tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan *bunyinya*. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	ومحمد إﻻرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikun Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Andi Wicaksono, M.Pd. Selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
6. Bapak Anwarudin, M.H.I. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Bapak dan Ibu saya yang selalu mendo'akan, mendidik, mendukung dan memberikan kasih sayang yang luar biasa yang tidak pernah ada habisnya, serta seluruh pengorbanan yang tidak dapat dinilai oleh apapun.
9. Semua pihak narasumber yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan banyak informasi terkait dampak Peraturan Bupati Karanganyar nomor 74 tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi dan bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari skripsi ini.
10. Kepada Farikha Anisatuzzahro yang selalu membantu, menyemangati, mendukung, serta selalu kebersamaan penulis dalam setiap langkah perjuangan meraih gelar sarjana ini.
11. Teman-teman angkatan 2016 yang telah terutama teman-teman HES I yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
12. Teman-teman seperjuangan santri Al-Hikmah yang saya anggap seperti keluarga sendiri.
13. Sahabat-Sahabat Aktivis Pmii Rayon Sunan Gunung Jati Fakultas Syariah, sahabat Dema F 2018, Dema F 2019 dan Dema I 2020.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 8 Oktober 2020

Penyusun,



Ilham Makruf Safii

ABSTRAK

ILHAM MAKRUFA SAFII, NIM: 162111329 “DAMPAK PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* STUDI KASUS DI KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH”.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal yang tersedia bagi masyarakat; dan pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan. Penelitian ini, membahas tentang bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 terhadap pedagang Olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak peraturan bupati Karanganyar nomor 74 tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, yaitu penelitian yang dinyatakan responden secara lisan dan perilaku nyata di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber data sekunder berasal dari dokumen-resmi, al-qur'an, hadis, buku-buku fiqh muamalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini objek penelitian adalah pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi. serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan akibat hukum dari adanya Peraturan Bupati yang sangat berpengaruh bagi masyarakat di bidang ekonomi, dan hukum islam (Ushul Fiqih) yakni *Maslahah Mursalah*. Para pedagang yang beralih profesi dari Olahan daging anjing ke usaha yang lebih layak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019. Dalam rangka untuk menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal yang tersedia bagi masyarakat khususnya kabupaten Karanganyar. Dalam tinjauan *Maslahah Mursalah* termasuk dalam *Maslahah Hajjiyah* dalam memelihara harta benda (*Hifdz Al-Mal*) dan memelihara/menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*), Peraturan Bupati ini cukup efektif dan mengandung masalah kebaikan bagi para pedagang dan konsumen.

Kata Kunci: Dampak, Masalah Mursalah, Peraturan Bupati, Olahan Daging Anjing

ABSTRACT

ILHAM MAKRUF SAFII, NIM: 162111329 "THE IMPACT OF KARANGANYAR REGENT REGULATION NUMBER 74 YEAR 2019 ON DOG PROCESSED TRADERS WHO SHIFT PROFESSIONAL PERSPECTIVE PROBLEMS OF CASE STUDY IN KARANGANYAR DISTRICT, JAWA". Karanganyar Regent Regulation Number 74 of 2019 concerning Supervision of Veterinary Public Health and Sales of Animal Food Products. The objective of this Regent Regulation is to ensure the circulation of safe, healthy, whole and halal meat available to the public; and guidelines for business actors in slaughtering Animals and providing Food originating from Animals. This research discusses how the Mursalah Maslahah Review on the Impact of Karanganyar Regent Regulation Number 74 of 2019 on processed dog meat traders who switch professions in Karanganyar Regency, Central Java. The purpose of this study is to determine the impact of Karanganyar regent regulation number 74 of 2019 on processed dog meat traders who switch professions in Karanganyar Regency, Central Java and Maslahah Mursalah's review of the Impact of Karanganyar Regent Regulation Number 74 of 2019 on processed dog meat traders who switch professions.

This research uses qualitative field research methods, namely research that is expressed by respondents verbally and real behavior in the field. The data sources used were primary data sources from interviews, observations, documentation, and secondary data sources from official-documents, al-quran, hadith, muamalah fiqh books. The data collection techniques used were observation, interview and documentation. In this case the object of research is a dog meat trader who has switched professions. and the data analysis technique used is descriptive analysis technique.

This research results in the legal consequences of the existence of a Regent Regulation which is very influential for the community in the economic sector, and Islamic law (Ushul Fiqih), namely the Maslahah Mursalah. Traders who change professions from processed dog meat to a more viable business and do not conflict with the Karanganyar Regent Regulation Number 74 of 2019. In order to ensure the circulation of safe, healthy, whole and halal meat available to the community, especially Karanganyar district. In the Maslahah Mursalah review, which is included in Maslahah Hajjiyah in maintaining property (Hifdz Al-Mal) and preserving the soul (Hifdz An-Nafs), this Regent Regulation is quite effective and contains maslahah of goodness for traders and consumers.

Keywords: Impact, Maslahah Mursalah, Regent Regulation, Processed Dog Meat

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TEORI TENTANG PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2019, TEORI SISTEM HUKUM , HUKUM ANJING DALAM AL-QURAN, HADIS, ULAMA' , DAN MAS^{LA}<u>HA</u>HAH MURSALAH	
A. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor74 Tahun 2019.....	30

1. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan	30
2. Maksud Dan Tujuan	35
3. Ruang Lingkup	35
4. Larangan.....	37
5. Sanksi Administrasi.....	37
6. Pelaporan. Pembinaan Dan Pengawasan.....	39
B. Teori Sistem Hukum	39
1. Pengertian Sistem Hukum	39
C. Hukum Jual Beli Anjing dalam Islam	46
1. Jual Beli Anjing dalam Al-Qur'an.....	46
2. Jual Beli Anjing dalam Al-Hadis.....	51
3. Jual Beli Anjing dalam Ilmu Fiqh	52
4. Anjing dalam Ilmu Kesehatan	54
D. <i>Maslahah Mursalah</i>	59
1. Pengetian <i>Maslahah Mursalah</i>	59
2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	63
3. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	63
4. Objek <i>Maslahah Mursalah MaslahahMursalah</i>	64
6. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	73

BAB III GAMBARAN KABUPATEN KARANGANYAR DAN DATA DAMPAK PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI

A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar	75
B. Demografi.....	76
1. Kependudukan.....	76

2. Agama.....	78
3. Daftar Pedagang Sate Anjing Yang Bersedia Beralih Usaha.....	79
B. Data dampak Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	82
BAB IV ANALISIS DAMPAK PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TERHADAP PEDAGANG OLAHAN DAGING ANJING YANG BERALIH PROFESI DAN DAN MAS^{LA}HAH MURSALAH	
A. Analisis terhadap dampak peraturan bupati nomor 74 tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.....	91
B. Analisis <i>Mas^{la}hah Mursalah</i> terhadap dampak peraturan bupati nomor 74 tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tenga.....	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara dengan bapak Stefanus Susanto, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sablon dan rentalan alat outdoor
- Lampiran 2 : Wawancara dengan bapak Fransiskus Maryadi, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sebagai petani,
- Lampiran 3 : Wawancara dengan bapak Gunannto, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sebagai pencari rumput sapi.
- Lampiran 4 : Wawancara dengan ibu Sri Partini, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sebagai penjual ricaa-rica mentok dan makanan,
- Lampiran 5 : Wawancara dengan bapak Slamet, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sebagai penjual olahan daging babi,.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era otonomi daerah kewenangan Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola daerahnya terutama pemerintah Kabupaten. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut aspirasi masyarakat. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Otonomi daerah tentu terdapat dampaknya seperti dampak positif dan negatif. Dari dampak positif, dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dapat kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya kendali dari pemerintah pusat akan membuat pemerintah daerah mendapatkan respon lebih, karena mandiri menghadapi masalah di daerah otonomnya. Disisi lain, dengan adanya otonomi daerah juga dapat menimbulkan dampak negatif, adanya kesempatan oknum-oknum di pemerintah daerah untuk

¹ Subar Junanto, *Civic Education*, (Sukoharjo: Fatba Perss, 2013), hlm. 88.

melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat.² Dengan begitu tidak hanya pemerintah namun rakyat juga memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di suatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional daerah, disisi lain untuk mendorong terbentuknya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.³ Salah satu kewenangan pemerintah daerah otonom Kabupaten adalah menumbuhkan dan memperkuat kemampuan ekonomi daerah.

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan baik itu dari segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan Kemadharatan bagi sesama manusia. tatanan dalam perekonomian sering disebut dengan muamalah.⁴ Di mana didalamnya dijelaskan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketaan, perikatan, jual beli dan lain sebagainya.

Di dalam Fiqih Muamalah terdapat aturan yang menjelaskan bahwa hak merupakan sesuatu yang digunakan oleh Syari'ah untuk menetapkan suatu

² Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hlm. 345-346.

³ Subar Junanto, *Civic Education*., hlm. 92.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indo\nesia, 2012), hlm.4.

kekusaan atau suatu beban hukum.⁵ Dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 59 Allah berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*⁶

Ayat ini menjelaskan tentang: wahai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah. Dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw. Dalam segala macam perintahnya dalam melakukan sesuatu, maupun perintah untuk melakukannya sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang mengurus urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan diantara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasulnya. Ayat ini juga mengisyaratkan

⁵ *Ibid*

⁶ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lantari Lestari, 2007)

berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif.⁷

Pemerintah mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan rakyatnya. Hal tersebut di sandarkan pada suatu kaidah usul fiqh yang sangat penting tentang tata hubungan antara pemerintahan dan masyarakat. Kaidah tersebut adalah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Artinya : “Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan”.*⁸

Ini artinya, pemerintah boleh melakukan berbagai kebijakan untuk mengatur rakyatnya, demi memakmurkan rakyatnya sepanjang hal itu dilakukan atas dasar alasan kemaslahatan. Di dalam Islam kemaslahatan berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Akan tetapi dalam tatanan muamalah harus memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan dalam berbisnis, seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad

⁷ M. Quraish, Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati : Jakarta, 2002. Hal 843-846

⁸ A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, (YOGYAKARTA: Pustaka Pesantren, 2010), hlm 73-75.

Saw.⁹ Dalam menjual barang dagangannya, pedagang harus memperhatikan aspek kelayakan, baik dari penjaminan barang yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal agar tidak terjadi kemadharatan dari dampak perdagangan tersebut.

Kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam dengan menolak kemadharatan maka kemaslahatan itu tidak berdasarkan nafsu manusia, tetapi dalam timbangan Syara'. Mewujudkan kemaslahatan adalah tahap pertama yang diteruskan dengan menjaganya sebagai tahap kedua. Kemaslahatan ada tiga macam yaitu primer, sekunder dan komplementer.¹⁰ Kemaslahatan dalam Islam pada dasarnya harus merujuk pada nilai-nilai kebaikan yang diringkas dalam lima prinsip yaitu (1) penjagaan terhadap agama (*Hifzd Al-Din*), (2) penjagaan terhadap jiwa (*Hifzd Al-Nafs*), (3) penjagaan terhadap akal (*Hifzd Al-'aql*), (4) penjagaan terhadap keturunan (*Hifzd Al-Nasl*), dan (5) penjagaan terhadap harta (*Hifzd Al-Mal*).¹¹

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut pemerintah Kabupaten Karanganyar melarang penjualan olahan daging anjing di wilayahnya. Kasus ini membuat pemerintah menindaklanjuti dengan memberikan bantuan modal agar beralih profesi. Bupati Karanganyar, Juliatmono menegaskan bahwasanya larangan ini muncul karena anjing bukan merupakan hewan ternak yang tidak

⁹ Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 288.

¹⁰ Jamal Ma'mur Asmawi, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 166.

¹¹ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 97.

layak dikonsumsi. Terlebih daging anjing itu rawan terkontaminasi penyakit rabies dan zoonosis.¹² Jumlah penjual olahan daging anjing di Karanganyar mencapai 34 pedagang yang bersedia beralih profesi.¹³ Harapannya bahwa bantuan dana langsung agar menjadi modal untuk beralih profesi.

Bantuan modal dari pemerintah untuk pedagang keseluruhan Rp. 5.000.000,- per pedagang, selain memberikan bantuan modal Juliayatmono selaku Bupati Karanganyar berjanji akan memberikan pendampingan selama setengah tahun bagi pemilik warung olahan daging anjing yang mau beralih profesi. Tak hanya itu, ia juga menawarkan bantuan berbagai perlengkapan untuk memulai usaha yang baru. Di sisi lain, jika masih ada pemilik warung masakan daging anjing tetap memilih buka, ia tak segan meminta pemilik warung itu keluar dari wilayah Karanganyar. Adanya larangan tersebut harapannya agar Karanganyar bebas penjual daging anjing.¹⁴

Kebijakan tersebut mengakibatkan penolakan yang dilakukan sejumlah pedagang olahan daging anjing yang menolak perintah Bupati. Karena mereka menganggap larangan yang disampaikan itu hanya bersifat lisan tidak ada regulasi dalam bentuk Perda dan larangan tersebut tidak mengikat. Salah satu pedagang

¹² Fajar Abrori, *Bupati Karanganyar Minta Penjual Kuliner Daging Anjing Ganti Profesi*, edisi. 22 Juni 2019, 23.00 WIB, Diperbarui 04 Juli 2019, 22.45 WIB, dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3994870/bupati-karanganyar-minta-penjual-kuliner-daging-anjing-ganti-profesi>, diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB.

¹³ Dokumen, Baznas Kabupaten Karanganyar, 8 Juni 2020, 10.00 WIB.

¹⁴ *Ibid* Fajar Abrori, <https://www.liputan6.com/regional/read/3994870/bupati-karanganyar-minta-penjual-kuliner-daging-anjing-ganti-profesi>, diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB.

Sukardi berpendapat, bahwa pemerintah belum memikirkan dampak dari pelarangan secara utuh.¹⁵ Tetapi di sisi lain ada 34 pedagang yang telah siap bersedia untuk beralih profesi, Karena kesadaran dalam diri pedagang bahwa olahan daging anjing merugikan konsumen secara tidak langsung dan berakibat pada kesehatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Vetriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjual Produk Daging Dari Hewan sebagai dasar hukum yang pasti yang mempunyai tujuan untuk menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal yang tersedia bagi masyarakat, pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan dan pencegahan Zoonosis .¹⁶ Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 hanya berlaku di wilayah Kabupaten Karanganyar saja, sedangkan di Kabupaten atau Kota Lain masih bebas berdagang olahan daging anjing dan belum adanya peraturan yang tegas mengenai larangan tersebut.

¹⁵ Ahmad Rafiq, Pedagang Daging Anjing Tolak Larangan Bupati Karang Anyar, edisi. Kamis, 20 Juni, 2019 17:20 WIB, dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1216578/pedagang-daging-anjing-tolak-larangan-bupati-karanganyar>, diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB.

¹⁶ Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019. Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner DiRumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beraih Profesi Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah ?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan jawaban secara konkret dan tepat mengenai permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk di jadikan pedoman bagi

pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah), serta di harpkan dapat dijadikan bahan bacaan , refrensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi masyarakat. Di harapkan masyarakat mampu memahami Dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah Perspektif *Maṣlahah Mursalah* dari sisi positif dan negatifnya.

E. Kerangka teori

1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Bupati Karangayar

Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap Pratik Perdagangan olahan daging anjing di Kabupaten Karanganyar dan menjamin keamanan segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk olahan hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, maka perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner di Kabupaten

Karanganyar, serta menjamin keamanan Pangan dan pencegahan Zoonosis maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap penjualan produk pangan dari hewan. Peraturan Bupati Karanganyar No.74 Tahun 2019 berisikan mengenai penjaminan peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) yang tersedia bagi masyarakat, dan pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan.¹⁷

Pada Peraturan Bupati Karanganyar No.74 Tahun 2019 Berisikan Mengenai Ketentuan Umum Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan , Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksana Pengawasan, Pembiayaan, Larangan, Sanksi Administrasi, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dan Ketentuan Penutup.

2. Teori Sistem Hukum

Setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Jadi hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya.¹⁸

¹⁷ Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan.

¹⁸ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 68.

Menurut Lawrence M. Fredman ada tiga unsur dalam sistem hukum yaitu pertama-tama sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan atau bahkan akan berada disitu dalam jangka panjang.

Inilah struktur sistem hukum, kerangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa) dan cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup (living law), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books).

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau di salah gunakan tanpa budaya hukum.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti Struktur Hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan atau menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Menurut Lawrence M Friedman seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*) yaitu Legal Substance (*Isi hukum*), Legal Structure (*Struktur Hukum*) dan Legal Culture (*Budaya Hukum*).¹⁹

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Maslahah Mursalah* yang dimaksudkan oleh ahli Ushul Fiqh adalah bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.²⁰

Secara mutlak, *maslahah mursalah* diartikan oleh ahli Ushul Fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Masalahah

¹⁹ Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki (Jakarta : PT Tatanusa, 2001), hlm 7-9.

²⁰ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP, 2010), hlm. 160.

ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya..²¹

Maslahah Mursalah ini disebut, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Seperti kemaslahatan yang dianut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak bukti Syara' yang menunjukkan terhadap kebenarannya atau kesalahannya. Tujuan dari pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka.²²

Kemaslahatan yang muncul karena tuntutan lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru setelah terhentinya wahyu, sedangkan Syari' belum mensyariatkan suatu hukum, dan tidak ada dalil Syari' yang mengakui atau membatalkannya, maka ini disebut dengan *Munasib Mursal*. Dengan kata lain disebut *Maslahah Mursalah*.²³

Dengan demikian, *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

²³ *Ibid*, hlm.140.

pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan yang syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari Syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan suatu yang menentukan sesuai dengan hukum Syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan kejadian tersebut dinamakan *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Tujuan utama *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.²⁴

4. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis melakukan tinjauan pustaka sebagai langkah dari penyusunan skripsi. Yang penulis teliti agar terhindar dari kesamaan judul dan lain-lain dari skripsi yang sudah ada sebelumnya. Setelah mengadakan tinjauan pustaka, ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang terdahulu yang relevan yang terkait dengan perdagangan olahan daging anjing yang penulis paparkan sebagai berikut :

Jurnal yang ditulis oleh Muh. Nashirudin tentang *Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) tentang makanan Halal dan Haram (Kajian Ushul Fikih)*. Dalam jurnal ini membahas tentang Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) tentang makanan halal dan haram dalam Islam yang di peroleh dari brosur MTA Ahad Pagi, Tafsir MTA dan wawancara dengan Ahmad Sukina (Ketua

²⁴ Maman Abdul Djaliel (ed), *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung; Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

MTA). Hasil penelitian ini menemukan bahwa MTA mengakui bahwa makanan yang dilarang dalam Islam terdiri dari empat hal, yaitu: bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah SWT.²⁵ Keterkaitan Jurnal tersebut dengan hasil penelitian ini bahwa sama halnya membahas tentang makanan halal dan haram dalam pandangan Islam. Sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan penulis adalah penulis lebih fokus pada dampak positif dan negatif adanya Peraturan Bupati, fokus penelitian penulis membahas tentang pedagang yang beralih profesi dalam pandangan *Maslahah Mursalah* .

Nike Maya Manro dan Nadia Yovani dalam jurnalnya berjudul “Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020: Problem Instansi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik di Bali.” Ia membahas tentang kebijakan Peraturan Daerah Bali Nomor 15 tahun 2009 terkait pengendalian rabies di provinsi Bali yang tidak efektif dan relevan. Karena masih banyaknya pemelihara anjing yang dikhawatirkan menyebabkan gangguan kesehatan dan rabies meningkat di wilayah Bali.²⁶ Disini sama-sama ada dasar hukum untuk pengendalian rabies yang ditimbulkan karena mengonsumsi daging anjing, obyeknya sama tapi disini dampaknya berbeda, jika dalam kebijakan Peraturan Daerah Bali Nomor 15 tahun 2009 terkait pengendalian rabies di provinsi Bali yang tidak efektif dan relevan.

²⁵ Muh. Nashirudin, *Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) tentang Makanan Halal dan Haram (Kajian Ushul Fikih)*. Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Al-Manahij Vol. X No.2, Desember 2016

²⁶ Nike Maya Manro & Nadia Yovani, *Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020: Problem Instansi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik di Bali*, JKKI: Vol. 07, No. 04 Desember 2018

Penulis lebih fokus terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 dan tinjauan *Maslahah Mursalah* .

Pepie Grisna Vikar Surri dalam jurnalnya yang berjudul "penyebaran rabies pada perdagangan anjing dalam penyutradaraan film dokumenter investigasi "Dog Meat Free" ia membahas bahaya penyebaran rabies melalui perdagangan anjing secara ilegal dengan memaparkan fakta yang terjadi di lapangan, melalui setatemen narasumber. penyutradaraan film dokumenter investigasi "Dog Meat Free" merupakan penyutradaraan investigasi yang berpusat pada isu permasalahan bahaya penyebaran rabies melalui perdagangan anjing ilegal.²⁷ Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya bahwa anjing penyebab adanya penyebaran rabies melalui perdagangan anjing. Sedangkan, perbedaannya antara penelitian ini dengan penulis adalah penulis lebih fokus pada dampak positif dan negatif adanya Peraturan Bupati, fokus penelitian penulis membahas tentang pedagang yang beralih profesi dalam pandangan *Maslahah Mursalah* .

Grace D. Kandou dalam jurnalnya yang berjudul "Kebiasaan Makan Makanan Etnik Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara". Ia membahas tentang pengaruh terhadap kesehatan ketika mengonsumsi makanan khas Minahasa seperti

²⁷ Pepie Grisna Vikar Surri, *penyebaran rabies pada perdagangan anjing dalam penyutradaraan film dokumenter investigasi "Dog Meat Free"*, Institut Seni Yogyakarta 2019.

babi putar, tinorangsek, RW (anjing) dan hewan liar lainnya. Lemak jenuh yang terkandung dalam makanan tersebut akan berpengaruh bagi kesehatan dan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat menyebabkan penyakit yang serius.²⁸ Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas dampak bagi kesehatan dari mengkonsumsi daging anjing atau hewan etnik lainnya. Sedangkan, perbedaannya penulis lebih fokus pada dampak pedagang yang dipaksa tutup dan beralih usaha yang lebih baik sesuai Standarisasi pangan. Serta tinjauan *Maslahah Mursalah* mengenai dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019.

Dendi Bagus Santriyo dalam skripsi dari yang berjudul “Praktik Jual Beli Olahan masakan Rica-rica Daging Anjing di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Warung Rica-rica P. Keperek, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung)”. Ia membahas tentang praktik jual beli masakan rica-rica daging anjing ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam. Salah satu prinsip bisnis yang berbasis Islam adalah barang yang dijual harus terjamin halalnya.²⁹ Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas olahan daging anjing yang belum terjamin halal. Sedangkan, perbedaan penulis lebih fokus terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan

²⁸ Grace D. Kandou, *Kebiasaan Makan Makanan Etnik Minahasa Di Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Maret – September 2009, Vol.03

²⁹ Dendi Bagus Santriyo, *Praktik Jual Beli Olahan masakan Rica-rica Daging Anjing di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Warung Rica-rica P. Keperek, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung*, skripsi diterbitkan, HES, IAIN Tulungagung (Tulungagung) 2019

akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 serta tinjauan *Maṣlahah Mursalah* .

Juli Tri Lirmalasari dalam skripsi dari Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.” Ia membahas tentang pelaksanaan jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Belitar dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Belitar. Hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan rukun dalam jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang atau objek yang diperjual belikan serta akad. Menurut hukum islam jual beli ini tidak sah dan haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan objeknya juga daging anjing yang termasuk hewan buas dan bertaring.³⁰ Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas olahan daging anjing yang belum terjamin halal. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian dari penulis adalah lebih fokus terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 serta tinjauan *Maṣlahah Mursalah* .

³⁰ Juli Tri Lirmalasari , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging DiKeluraham Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Belitar*, skripsi diterbitkan, HES, IAIN Tulungagung (Tulungagug) 2019.

Wahyuddin Arsyad dalam skripsi dari Yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta” Ia membahas tentang latar belakang terjadinya proses jual beli anjing yang terjadi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta serta tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing. Hasil dari penelitian ini adalah faktor utama jual beli anjing adalah faktor ekonomi dan masyarakat yang senang terhadap anjing, selain itu para pembeli sebagian merupakan dokter hewan yang digunakan untuk penelitian dan masyarakat yang d untuk menjaga rumah bukan untuk mengkonsumsi³¹ Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas anjing sebagai objeknya. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian dari penulis adalah, peneliti sebelumnya yang lebih fokus kepada para pembeli, sedangkan penulis lebih fokus kepada terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 serta tinjauan *Maslahah Mursalah* .

Lutfi Arsyad dalam skripsi Yang berjudul “Azas Manfaat dalam Jual Beli Anjing Tinjauan Hukum Islam” Ia membahas tentang pandangan Ulama tentang hukum jual beli anjing dan manfaat dari hasil jual beli anjing serta akibat hukum dari jual beli anjing. Hasil dari penelitian ini adalah pendapat Ulama fiqh

³¹ Wahyuddin Arsyad Yang berjudul *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus dipasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, skripsi diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka (Yogyakarta) 2016.*

yang memeperbolehkan dan yang melarang dan manfaat adanya penjualan anjing untuk memenuhi kebutuhan dan menambah penghasilan bagi para penjual. Dan akibat hukum adanya jua beli ini ulama memberikan status hukum haram secara mutlak dan haram secara mutlak.³² Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas anjing sebagai objeknya. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian dari penulis adalah, peneliti sebelumnya yang lebih fokus kepada penelitian pustaka saja, sedangkan penulis lebih fokus kepada terhadap penelitian lapangan terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 serta tinjauan *Maslahah Mursalah* .

Agus Wiyono dalam Disertasi dari Yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Olahan Berbahan Dasar Daging Anjing di Kota Surakarta” Ia membahas tentang perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran jenis-jenis olahan berbahan dasar daging anjing, yang belum ada peraturan yang melarang peredaran makanan tersebut, serta mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan bahaya dari olahan daging anjing terhadap kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran makanan olahan berbahan dasar daging anjing di kota Surakarta masih tinggi dan belum ada regulasi yang jelas dari pemerintah Kota Surakarta terkait larangan

³² Lutfi Arsyad, *Azas Manfaat dalam Jual Beli Anjing tinjauan Hukum Islam*, skripsi diterbitkan, muamalah Fakultas Syariah STAIN Mataram, (Mataram), 2003.

peredaran daging anjing di wilayah Surakarta. Namun telah keluar kebijakan yang berupa surat edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan peredaran atau perdagangan daging anjing.³³ Keterkaitan dengan penelitian ini bahwa sama halnya membahas anjing sebagai objeknya dalam penelitaian penulis terdahulu lebih cenderung kepada perlindungan konsumennya saja. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian dari penulis adalah, penulis lebih fokus kepada terhadap terhadap para pedagang yang dipaksa beralih usaha agar tidak memperdagangkan daging anjing lagi. Dan akibat hukum adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 serta tinjauan *Maslahah Mursalah* .

5. Metode Peneilitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.³⁴

³³ Agus Wiyono, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Olahan Berbahan Dasar Daging Anjing DiKota Surakarta, Desertasi diterbitkan Program StudiMegister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana UMS Surakarta, (Surakarta), 2019.

³⁴ Husaini Usman dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 41.

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan objektif untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian.

1. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif tipe yuridis normatif, yang dilakukan dalam kehidupan atau kenyataan sebenarnya. Yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁵
2. Sumber Data Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁶

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti secara bersangkutan.³⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah para pedagang olahan daging anjing yang siap beralih profesi yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 2019. Penelitian ini akan menggunakan sampel acak dari beberapa populasi di Kabupaten Karanganyar. Populasi adalah keseluruhan

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105

³⁶ *Ibid*, hlm.106

³⁷ *Ibid*.

atau sekumpulan unsur atau elmen yang menjadi objek penelitian³⁸, yaitu seluruh pedagang olahan daging anjing yang siap beralih profesi, yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 2019. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian.³⁹ Sampel yang diambil peneliti secara acak yaitu pedagang olahan daging anjing yang siap beralih profesi berdasarkan lama usaha dagang anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 2019. Peneliti mengambil 5 sampel yang terdiri dari 1 pedagang yang berasal dari kabupaten Sukoharjo yang berdagang di wilayah Colomadu Kabupaten Karanganyar Dan 4 pedagang yang berasal dari Kabupaten Karanganyar yang siap beralih profesi.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁴⁰ Diambil atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019, buku-buku ushul fiqh, buku-buku hukum, buku-buku kesehatan hewan, jurnal ilmiah, internet yang berkaitan dengan pedagang olahan daging anjing di Kabupaten Karanganyar.

³⁸ *Ibid.*, hlm.98

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.106

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah terletak antara 110°40”–110°70” Bujur Timur dan 7°28” - 7°46” Lintang Selatan Ketinggian rata-rata 511 meter diatas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22°–31°. Lokasi ini berbatasan dengan Sebelah Utara : Kabupaten Sragen, Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur, Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Waktu penelitian ini telah dilakukan selama 5 bulan, yaitu mulai 13 Mei 2020 sampai 13 September 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan percakapan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam wawancara peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara/petunjuk wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan sebagai pengontrol agar tidak terjadi penyimpangan masalah yang akan diteliti.⁴¹

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 190.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang disusun secara rapi di mana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam penelitian.⁴² Teknik wawancara terstruktur ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai bagaimana dampak Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 terhadap pedagang Olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Sebelum mengadakan wawancara dengan responden peneliti sudah menyediakan pedoman wawancara secara garis besarnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara ini dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Wawancara dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 terhadap dampak pedagang Olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Peneliti mengambil sampel 5 sampel yang terdiri dari 1 pedagang yang berasal dari kabupaten Sukoharjo dan 4 pedagang yang berasal dari kabupaten Karanganyar yang siap beralih profesi.

b. Dokumentasi

⁴² *Ibid.*

Teknik dokumentasi digunakan dengan maksud untuk memperkuat dan melengkapi data yang akan dihasilkan. Teknik dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menemukan data mengenai hal-hal yang diteliti melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya⁴³. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang dan pelengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini, dokumen yang akan penulis lihat adalah berbagai data para penjual Olahan daging anjing yang bersedia beralih profesi.

c. Observasi

Metode ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Penelitian menggunakan metode observasi non partisipan adalah dimana observer tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat, didalam hal ini observer hanya bertindak sebagai peneonton saja tanpa harus ikut terjun ke lapangan.⁴⁴ Dalam melakukan observasi, peneliti ini meneliti, mengamati dan mencari tentang apa saja yang terkait dengan dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun

⁴³ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Ad Affset, 1989), hlm. 136.

2019 terhadap Pedagang Olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Miles and Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.”⁴⁵ Langkah-langkah dalam analisis data Miles and Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *data coclusion drawing/verification*.⁴⁶

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis mencoba menggunakan penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing/verification

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 91.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 92-99

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari Sub-sub pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, menguraikan tentang landasan teori yang terdiri dari Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019, Sistem Hukum, Hukum Jual Beli Anjing dalam Islam dan *Maslahah Mursalah*.

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN, berisi tentang gambaran umum Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dan data dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi di Kabupaten karanganyar, Jawa Tengah

BAB IV ANALISIS, berisi tentang analisis terhadap dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 terhadap pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi dan Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 terhadap Pedagang olahan daging Anjing Yang Beralih Profesi.

BAB V PENUTUP, bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

A. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019

1. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di bidang peternakan menetapkan beberapa peraturan diantaranya :

- a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, paska panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
- b. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
- c. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pangan.
- d. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia

- e. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- f. Hewan Pangan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
- g. Hewan *Non* Pangan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya tidak boleh untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
- h. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lainya disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
- i. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari Hewan ke manusia atau sebaliknya.
- j. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan

- yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
- k. Ruminansia Besar adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
 - l. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
 - m. Unit Penanganan Daging (meat cutting plant) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.
 - n. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari *tarsus/karpus* ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*).
 - o. Daging adalah bagian dari otot *skeletal* karkas yang lazim, aman, dan layak

dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).

- p. Daging Segar Dingin (*chilled*) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C.
- q. Daging Segar Beku (*frozen*) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan didalam *blast freezer* dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C
- r. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
- s. Pemeriksaan *Ante-mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
- t. Pemeriksaan *Post-mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang
- u. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan Daging Hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
- v. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai

kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan; syariah agama Islam.

- w. Penanganan Daging Hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
- x. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk, oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
- y. Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH dan/atau UPD berdasarkan rekomendasi dari Bupati yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
- z. Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi.
- aa. Daerah Bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah.
- bb. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimiadan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
- cc. Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan *ante-mortem*.

dd. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.¹

2. Maksud Dan Tujuan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaksanaan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) yang tersedia bagi masyarakat; dan
- b. pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan.²

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: Pelaksanaan Pengawasan; Kegiatan pengawasan Kesmavetdi RPH meliputi:

- a. penerapan Kesehatan Hewan;
- b. pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum disembelih (ante-mortem inspection);
- c. Pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (stunning);
- d. pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau Karkas (post-mortem inspection);

¹ Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 *Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan.*

² *Ibid.*

dan

- e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi.

Kegiatan pengawasan penjualan produk Pangan dari Hewan meliputi:

- a. perizinan usaha;
- b. penerapan standar halal bagi produk pangan halal;
- c. memastikan asal Hewan merupakan Hewan Pangan yang diproduksi dengan memperhatikan aspek kesejahteraan Hewan dengan mempertimbangkan aspek Zoonosis dan keamanan Pangan; dan
- d. pemeriksaan tata cara penyiapan dan produksi Pangan.

Kegiatan Pengawasan Kesmavet dilaksanakan pada :

- a. tempat budidaya;
- b. tempat produksi pangan asal hewan;
- c. tempat produksi produk hewan non pangan;
- d. tempat pengumpulan;
- e. tempat penyimpanan;
- f. tempat penjualan; dan
- g. pengangkutan.³

³ *Ibid.*

4. Larangan

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha penjualan/Pemotongan Daging baik mentah atau olahan yang berasal dari Hewan *Non* Pangan untuk tujuan konsumsi;
- b. melakukan kegiatan usaha Rumah Potong Hewan dan penjualan produk/olahan Hewan Pangan tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan Pemotongan Hewan tanpa memperhatikan aspek Kesejahteraan Hewan, Higiene Sanitasi dan kriteria Hewan Potong.

Setiap Orang atau Badan dilarang mengedarkan dan/atau mendistribusikan Hewan *Non* Pangan untuk dikonsumsi dari/menuju ke Daerah.⁴

5. Sanksi Administrasi;

- a. Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi Administrasi berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Pencabutan Sementara Izin;
 - 3) Penutupan;
 - 4) Pencabutan Izin;
 - 5) Denda Administrasi.

⁴ *Ibid.*

- b. Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
- 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Pengambilalihan/penyitaan barang;
 - 3) Pemusnahan;
 - 4) Denda Administrasi.
- c. Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan secara bertahap dengan jeda antar sanksi paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dan pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan
- e. Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- 1) Biaya pengawasan dan pemulihan ke kondisi ideal yang diharapkan;
 - 2) Biaya kompensasi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat guna memenuhi asas keadilan masyarakat; dan
 - 3) Menimbulkan aspek jera bagi pelaku.
- f. Denda Administrasi disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan Pendapatan Daerah lainnya.
- g. Pemanfaatan Denda Adminsitasi dapat dialokasikan bagi kegiatan:

- 1) Pemeriksaan Keamanan Pangan;
- 2) Pengendalian Zoonosis Hewan;\
- 3) Pengawasan Kesmavet; dan
- 4) Pemulihan kondisi lingkungan.⁵

6. Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan wajib melaporkan hasil pengawasan Kesmavet kepada Bupati.
- b. Pembinaan terhadap Kesmavet dilaksanakan secara terpadu oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- c. Pengawasan fungsional . dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati. ⁶

B. Teori Sistem Hukum

1. Pengertian Sistem Hukum

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa kontinental. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

sehingga membentuk suatu totalitas. Hukum merupakan peraturan didalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk menaatinya.⁷ Pendapat lain, hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.⁸ Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁹ Jadi sistem hukum adalah satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Dalam satu negara hukum, sistem hukum dibuat dalam rangka menciptakan negara hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara. Salah satu ciri dari negara hukum sebagai mana yang disampaikan oleh Frans Magnis Suseno adalah mengenai fungsi-fungsi kenegaraan yang dijalankan berdasarkan ketetapan undang-undang. Dalam hal ini, peran-peran aparatur negara diatur berdasarkan aturan perundang-undangan dan masing-masing berperan saling melengkapi dalam satu struktur hukum, yang menjadi salah satu aspek dari sistem hukum.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 15 Juni 2020, 10.00 WIB.

⁸ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 3.

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 48.

Sedangkan sistem hukum merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan dianut dalam suatu masyarakat. Sistem hukum dibuat dalam rangka menciptakan negara hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara.

- a. Pengertian Struktur Hukum (*structure of law*), Friedman menjelaskan:¹⁰

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Structure also means how the legislature is organized....what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum, terdiri atas unsur pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang yang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berkaitan dengan penataan badan legislatif,

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation), 1975, hlm. 4-5.

kewenangan dan juga kewajiban dari presiden, dan prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian, serta beberapa ketentuan lainnya. Singkatnya, struktur hukum ini terdiri dari lembaga hukum yang menjalankan perangkat hukum yang ada.¹¹

Struktur juga merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹²

Di Indonesia misalnya, jika berbicara tentang struktur hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹³ Sistem struktural ini jugalah yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

b. Substansi Hukum (*substance of the law*) menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside

¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

¹² *Ibid*, hlm. 7.

¹³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 2005), hlm. 8.

the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books".¹⁴

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Relasi antara substansi dengan struktur adalah, bahwa substansi ini berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.¹⁵ Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).¹⁶ Substansi hukum ini juga merupakan penentu bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

Sebagai negara yang menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental, maka yang disebut hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum, meskipun tetap mengakui keberadaan dari hukum adat. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, hlm 8-9.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Konsekuensinya, bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum adalah, apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

- c. budaya hukum (*legal culture*), Friedman berpendapat:¹⁷

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the criminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, namun jika tidak didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial (*social engineering*), merupakan sebuah ide yang ingin

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 15-16.

diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa social ke arah yang lebih baik, maka tidak hanyamembutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, adanya jaminan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berjalan dengan baik.¹⁸ Dalam hal ini, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya saja, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁹

Kultur hukum ini merupakan sikap manusia terhadap hukum yang menyangkut pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau Disalah gunakan. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

¹⁸ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 40.

¹⁹ Achmad Ali, *Keterpurukan ...*, hlm. 97.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai sebagaimana yang menjadi tujuan negara hukum.

C. Hukum Jual Beli Anjing dalam Islam

1. Dalam Al-Qur'an

a. Anjing Senantiasa Menjulurkan Lidah

Anjing sebagai hewan yang senantiasa menjulurkan lidahnya diungkapkan oleh Allah swt. dalam QS Al-A'raf/7 :176

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
 إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ
 فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga).*

*Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.*²⁰

Kata *yalhas* terambil dari akar kata *lahas* yang berarti terengah-engah, karena sulit bernafas seperti yang baru berlari cepat. Penggalan ayat ini mengutarakan sesuatu fenomena, yaitu bahwa anjing selalu menjulurkan lidah, saat dihalau maupun dibiarkan. Ini disebabkan karena anjing tidak memiliki kelenjar keringat yang cukup dan berguna untuk mengatur suhu badan. Karena itulah, untuk mengatur suhu badannya, anjing selalu menjulurkan lidah. Sebab, dengan cara membuka mulut yang biasa dilakukan dengan menjulurkan lidah, anjing dapat bernafas lebih banyak dari biasanya.²¹

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan perumpamaan tentang siapapun yang sedemikian dalam pengetahuannya, sampai-sampai pengetahuan itu melekat pada dirinya, seperti melekatnya kulit pada daging. Namun ia menguliti dirinya sendiri, dengan melepaskan tuntunan pengetahuannya. Ia diibaratkan seekor anjing yang terengah-engah sambil menjulurkan lidahnya. Biasanya yang terengah-engah adalah yang letih, atau yang kehausan membutuhkan air, tetapi anjing menjulurkan

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Dua Sehati, 2012), hlm173.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Juz 5, hlm. 310.

lidahnya tidak hanya ketika ia letih atau kehausan, tetapi sepanjang hidupnya ia selalu demikian, sama dengan seorang yang memperoleh pengetahuan tetapi terjerumus mengikuti hawa nafsunya. Seharusnya pengetahuan tersebut membentengi dirinya dari perbuatan buruk, tetapi ternyata, baik ia butuh maupun tidak, baik ia telah memiliki hiasan duniawi maupun belum, ia terus menerus mengejar dan berusaha mendapatkan dan menambah hiasan duniawi itu, karena demikian telah menjadi sifat bawaannya seperti keadaan anjing tersebut. Sungguh buruk keadaan siapapun yang demikian. Adakah yang lebih buruk dari seorang yang menguliti dirinya sendiri, menelanjanginya dengan menanggalkan derajatnya? Adakah yang lebih buruk dari siapa yang menempelkan dirinya ke bumi padahal dia dapat mengangkasa? Adakah orang yang lebih menganiaya dirinya lebih dari ini? Tidak ada.²²

b. Anjing Penjaga

Anjing penjaga yang mengunjurkan lengannya disebutkan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Kahfi/18 :18

وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَازًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ
ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا

²² *Ibid.*,

Terjemahnya: *Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan (diri) dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.*²³

Dalam kitab Tafsir Zad al-Masīr karangan Muhammad al-jauzi ayat di atas menjelaskan bahwa mereka mengira orang-orang yang berada dalam gua tersebut terbangun. Ibnu Sa'ab juga menguraikan bahwa: mereka mengira bahwa orang-orang yang berada dalam gua tersebut terjaga karena mata mereka terbuka padahal mereka tertidur dan kemudian dibolak balikkannya tubuh mereka.²⁴

Menurut Abu Abdurrahman bin Tayyib menjelaskan bahwa seseorang yang ingin membedakan antara orang tidur dan orang yang hanya sekedar berbaring dapat dilakukan dengan melihatnya langsung. Sampai-sampai seandainya yang berbaring tersebut pura-pura tidur maka bisa diketahui dia tidak tidur padahal mereka tertidur.²⁵

c. Anjing Pemburu

Anjing sebagai hewan pemburu disebutkan oleh Allah swt, dalam QS. al-Mā'idah/5 :4

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 295

²⁴ Jamāl al-Dīn Abu Firaj' Abd al-Rahman bin 'Alī bin Muhammad al-Jaūzī, *Zād al-Masīr Ulum al-Tafsīr*, Juz III, (Dār al-Kitāb al-Arabī-1422 H), hlm. 71.

²⁵ Muhammad bin Ṣalih al-Utsaimin, *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm Surah al-Kahfī terj. Abu Abdirahman bin Ṭayyib, Tafsīr al-Kahfī* (Cet. I: Jakarta; Pustaka al-Sunnah, 2005), hlm. 65-66.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.²⁶

Tentang anjing yang dapat dilatih sebagai hewan pemburu M. Quraish shihab menjelaskan bahwa makna dari ,kamu ajar dengan melatihnya itu', agaknya ditekankan di sini, walau sesudah kalimat itu disebutkan lagi kalimat ,kamu mengajar mereka', untuk mengisyaratkan bahwa pengajaran binatang-binatang itu hendaknya dilakukan melalui pelatihan yang sungguh-sungguh dan dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tersebut.²⁷

Adapun konteks ayat QS. al-Mā'idah ayat ketiga telah dijelaskan izin untuk berburu, dan larangan memakan bangkai, dan disisi lain ada binatang buruan yang mati terbunuh oleh anjing terlatih, maka para sahabat bertanya

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, hlm. 26-27

tentang hal tersebut, maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwa: mereka menanyakan kepadamu: ,apakah yang di halalkan bagi mereka?’ katakanlah: ,dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, yakni yang sesuai dengan tuntunan agama atau yang sejalan dengan selera kamu, selama tidak ada ketentuan agama yang melarangnya, termasuk binatang halal yang kamu sembelih sebagaimana diajarkan Rasul saw. dan dihalalkan juga buat kamu binatang halal hasil buruan oleh binatang buas seperti anjing, singa, harimau, burung yang telah kamu ajar dengan melatihnya dengan bersungguh-sungguh untuk berburu, yakni menangkap binatang dan memperolehnya guna diberikan kepada kamu, bukan untuk diri mereka. Kamu mengajar mereka, yakni binatang-binatang itu, menurut apa yang telah di ajarkan Allah kepada kamu, tentang tata cara melatih binatang. Jika yang demikian itu yang kamu lakukan maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kamu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu sewaktu kamu melepasnya untuk berburu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabNya yakni perhitungannya.²⁸

2. Hukum Anjing Dalam Al-Hadis

Hadis larangan jual beli anjing riwayat Hadis dari Muslim, Imam Muslim mengeluarkannya dalam Sāhih Muslim, bersumber dari Jābir bin

²⁸ *Ibid* , hlm. 25-26

Abdullah, kitab *almasāqāt* pada bab tahrīm saman *al-kalb wa hulwān alkāhin wa mahr al-bagy wa al-nahy 'an bai' al-sinnaur*, hadis nomor 1569.

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّورِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

"Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabīb telah menceritakan kepada kami al Hasan bin A'yan telah menceritakan kepada kami Ma'qil dari Abī az-Zubair dia berkata; saya bertanya kepada Jābir mengenai uang hasil usaha jual beli anjing dan kucing, dia menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang perbuatan seperti itu."²⁹

3. Hukum Anjing Dalam Fiqh

Pendapat ulama tentang jual beli anjing Mengenai larangan jual beli anjing dan kucing, Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab-sebab pelarangan binatang tersebut. Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Imam Muslim*, menjelaskan bahwa larangan atas harga anjing ini merupakan seburuk-buruknya penghasilan dan sesuatu yang tidak baik, maka penjualannya tidak sah dan hasil penjualannya tidak halal, dan tidak diperhitungkan atas orang yang menghilangkannya, baik anjing terlatih atau tidak, yang boleh dimanfaatkan maupun tidak. Pendapat ini dianut oleh Abu Hurairah, Hasan Al-Basri dan sebagainya. Sedangkan larangan atas harga kucing lebih bersifat makruh karena kucing dianggap tidak bermanfaat. Namun

²⁹ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisāburi, *Sahih Muslim*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H), h. 33.

apabila kucing itu memiliki manfaat maka penjualannya sah dan hasilnya juga halal, pendapat ini disetujui oleh mayoritas ulama selain dari Ibnu AlMunzir, Abu Hurairah, Tawus dan Mujahid³⁰.

Dalam kitab *Syarah 'Aun al-Ma'būd*, beliau mengutip pendapat Al-Khattābi bahwa larangan jual beli anjing itu karena ada kerusakan di dalam akad jual beli, andai akad itu sah (tidak terdapat kerusakan) maka memperjualbelikan anjing menjadi wajib dan di perintahkan, tidak menjadi sesuatu yang dilarang.³¹

Dalam kitab *Tuhfah Al-Ahwadī Syarah al-Turmuẓi*, disebutkan bahwa jual beli anjing bersifat haram. Namun, jika jual-beli (anjing buruan) itu termasuk sesuatu yang bermanfaat, maka sah melakukan transaksi jual beli dan uang hasil penjualannya halal. Pendapat ini adalah mayoritas ulama. Larangan hadis ini lebih mengarah pada kemanfaatannya³²

Sedangkan dalam *Syarah Al-Nasā'i*, dijelaskan bahwa larangan pada hadis tersebut berlaku jika tidak terdapat manfaat, apabila memiliki manfaat maka akad jual belinya sah dan hasilnya halal. Adapun larangan jual beli anjing bersifat tahrīm menurut mayoritas ulama. Namun, untuk pengecualian

30 Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Darwis, (Jakarta:Darrus Sunnah, 2013), h. 714.

31 Abū al-Ṭayyib Abādi, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāwud*, (T.tp: Dār al-Fikr. T.th.), Vol. 10, h. 372.

32 Al-Hāfiz Muhammad Abdurrahmān ibn Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuhfat al-Ahwadī bi Syarh Jami' al-Turmuẓi*, (Beirut: Dār alFikr, t.th.) Vol. 4, h.500.

terhadap anjing buruan diperbolehkan karena termasuk sesuatu yang bermanfaat, Abu Hurairah, Ṭawus, Mujahid, dan Jabir bin Zaid adalah satu golongan yang membolehkan.³³

Dengan demikian, menurut mayoritas ulama jual beli anjing secara umum bersifat tahrīm yakni diharamkan tanpa mengambil pengecualian, adapun pengecualian terhadap anjing masih dalam pertimbangan.

4. Anjing dalam Ilmu Kesehatan

Anjing adalah hewan menyusui, berkaki empat dan berbulu, ada sekitar dua ratus jenis anjing, yang paling kecil chihua-hua hanya sekitar 68 gr dan yang paling besar jenis St. Bernard sekitar 90 Kg. Anjing biasanya memiliki sekitar 42 gigi lebih banyak 10 gigi dibandingkan dengan manusia kebanyakan memiliki ujung atau sisi yang tajam, memang bagi anjing menggigit lebih penting dari pada mengunyah, maha suci Allah yang telah memberi organ-organ mahluk-Nya sesuai dengan kebutuhannya.³⁴

Anjing merupakan binatang yang dapat menjadi perantara penyebaran penyakit-penyakit menular, bahkan ia bisa membawa hampir lima puluh jenis penyakit akibat kandungan hewan-hewan parasit di dalam tubuhnya, dan

³³ Al-Hāfiz Jalāluddīn al-Suyūti, dalam Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahmān al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i bi Syarh al-Hāfiz* Jalāluddīn al-Suyūti wa Hāsiyah al-Imām al-Sindi, Vol.4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930 M/1348 H), h. 216.

³⁴ M.Qurais Shihab, *Dia Dimana Mana Tangan Tuhan Dibalik Setiap Penomena* (Cet. IV; Jakarta: PT. Lentera Hati, 1427 H/2006 M), h. 254-255

sebagian besar penyakit ini terdapat di dalam air liurnya. Dari lidah anjing terdapat telur-telur cacing yang menyebar ke tempat-tempat air, piring, dan tangan pemiliknya bahkan di antara cacing ini ada yang masuk ke dalam lambung dan usus-usus mereka. Pada tahap selanjutnya kulit telur-telur ini akan pecah dan diiringi dengan keluarnya anak-anak cacing baru yang akan menyebar ke dalam darah dan lendir. Dari dua organ ini, anak-anak cacing kemudian menyebar ke seluruh anggota tubuh, terutama ke liver, karena liver merupakan filter yang paling utama dalam tubuh. Di dalam anggota tubuh yang dimasuki cacing-cacing ini kemudian dapat tumbuh dan membentuk kantong yang dipenuhi anak-anak baru dan cairan bersih laksana air dari mata air. Mengingat betapa berbahayanya bakteri-bakteri yang terdapat di dalam air liur anjing maka dalam agama Islam diperintahkan membasuh bekas jilatan anjing tujuh kali dan menggunakan tanah pada basuhan terakhir.³⁵

Kesimpulan para dokter tentang keharusan membasuh jilatan anjing dengan tanah memiliki hikmah bahwasanya virus anjing sangat lembut dan kecil. Sebagaimana diketahui semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah. Air liur anjing yang mengandung virus berbentuk pita cair. Dalam hal ini, tanah berperan

³⁵ M. Nizar Daqr, *Hidup Sehat Dan Bersih Ala Nabi* (Cet. III; Jakarta: PT. Himmah Pustaka, 2002 M), hlm. 241-243

sebagai pembersih mikroba berikut virus-virusnya yang menempel dengan lembut pada wadah bekas jilatan anjing³⁶

Hubungan antara manusia dan anjing ini demikian dekat walaupun pada kenyataannya anjing dapat menghantarkan beberapa penyakit yang berbahaya serta berpotensi menjadi hewan pemangsa yang sewaktu-waktu dapat membahayakan manusia. Anjing menjadi bagian penting dari komunitas suku indian Athabaskan di Umerika Utara, dan merupakan satu satunya hewan peliharaan mereka. Anjing juga menjadi pembawa barang bawaan pada saat migrasi suku indian Apache dan Navayo pada 1.400 tahun lalu. Kebiasaan menjadikan anjing sebagai pembawa beban masih dijumpai, meski kuda sudah masuk ke Amerika. Konon migrasi manusia dari Asia ke Amerika melalui Selat Baring pada sekitar 12.000 tahun yang lalu tidak mungkin terjadi tanpa bantuan anjing yang bertugas menarik kereta es, anjing membantu manusia dari mulai berburu, mengembala ternak, menjaga rumah, membantu tugas kepolisian maupun miliiter, sebagai teman, hingga membantu mereka yang cacat' misalnya membantu menuntun dan mengarahkan tunanetra. Di Jazirah Arab dikenal satu jenis anjing saluki yang mana anjing ini memiliki kecepatan dan kecekatan sehingga jenis anjing ini biasa masyarakat setempat gunakan

³⁶Hisham Thalbah, *Kemukjizatan Penciptaan Hewan Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis* (Cet, I; Bekasi: Pt Sapta Sentosa, 2008), hlm.125-126.

untuk berburu. Dalam berburu, anjing ini biasanya dipadukan dengan burung falcon.³⁷

Tentang keturunan anjing menurut linnaeus, seorang ahli taksonomi pada tahun 1958 mula-mula memasukkan anjing domestikasi ke dalam nama *canis familiaris* dan *canus familiarus domesticus* pada tahun 1993 penempatan nama tersebut kemudian diusulkan untuk diubah menjadi *canis lupus familiaris* suatu anak jenis dari serigala abu-abu. Perubahan ini didasarkan pada bukti-bukti penelitian perilaku, peraswakan, penelitian biologi molekuler, yang berujung pada kesimpulan bahwa serigala abu-abu adalah nenek moyang dari sekian banyak keturunandari anjing peliharaan .³⁸

Hubungan antara anjing dan manusia sudah berjalan lama. Anjing telah menjadi teman dalam bekerja dari berburu sepanjang sejarah kehidupan manusia, sejak didomestikasi 15.000 tahun yang lalu sejak saat itu.³⁹

Anjing adalah hewan yang mempunyai peran atau manfaat yang berbeda-beda terhadap manusia semua tergantung seperti apa porsi yang dibutuhkan dan pendekatan yang digunakan dalam memahami anjing, inilah yang menjadi penyebab munculnya perbedaan-perbedaan perspektif di

³⁷ Kementerian Agama RI, *Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, hlm. 65

³⁸*Ibid* , hlm. 64.

³⁹ *Ibid*,

kalangan para ahli ketika mengutarakan pandangan mereka tentang anjing. Seperti halnya pengertian anjing secara umum semua orang sepakat bahwa anjing adalah hewan menyusui, berbulu, berkaki empat dan memiliki penciuman yang tajam. Tetapi dalam pengertian khusus bagi umat Islam pada umumnya akan memaknai anjing sebagai hewan najis. Bagi seorang polisi anjing merupakan hewan pelacak dan pembunuh, dan bagi aktris film amerika barangkali merupakan teman sekamar di saat kesepian.⁴⁰

Mereka berbeda-beda pandangan dan pengertian tentang anjing disebabkan berbedanya porsi pemanfaatannya dan pendekatan terhadap anjing itu sendiri, berbedanya pengertian setiap orang tentang anjing akan mempengaruhi sikap seseorang itu juga terhadap hewan tersebut. Ada yang menyayangnya, ada yang melatihnya, bahkan ada yang menghindari dan membunuhnya. Ini tergantung seperti apa mereka memaknai hewan tersebut.

Ulama berbeda pendapat mengenai maksud ayat yang menginformasikan dibolak balikannya badan mereka, ada yang berpandangan bahwa pembolak balikan itu bukannya bertujuan memelihara jasad mereka, karena jika demikian mengapa anjing dapat terpelihara jasadnya tanpa dibolak-balikkan? Ada juga yang berpendapat bahwa anjing mereka mati dan tidak tertinggal kecuali tulang belulang. Namun, pendapat itu tidak dapat diterima karena jika demikian, tentu pemuda-pemuda itu tidak akan menduga tertidur

⁴⁰ Tim penyusun, *‘Hijrah Menuju Islam Kaffah’*, Cahaya Nabawiy, no. 163, 2017: hlm. 243

sekitar sehari saja. Agaknya, yang benar adalah ajing mereka pun bergerak silih berganti, walau di sini tidak secara tegas disebut, karena telah dapat dipahami dari keadaan pemuda-pemuda itu.⁴¹

D. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Menurut bahasa kata *Maslahah* berarti “Manfaat” dan *Mursalah* berarti “lepas”. Jadi menurut istilah seperti yang dikemukakan menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu “Sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung ataupun yang menolaknya” sehingga hal ini disebut *Maslahah Mursalah* (*Maslahah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁴²

Sumber lain juga mengatakan *Maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *Shalah* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awal yang berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau rusak. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.⁴³ Fuqoha Hanabillah

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, hlm. 260.

⁴² Satria Effendi M Zein. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 7, hlm. 135-136.

⁴³ Amir Syafiruddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), cet. 4, hlm. 323.

menetapkan bahwa *Maslahah* adalah suatu dasar dari dasar dasar Tasyri'. Ibnul Qayyim menetapkan demikian juga.⁴⁴

Pengertian *Maslahah* dalam arti Arab berarti “Perbuatan perbuatan yang menuju kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah*.⁴⁵

Seluruh yang Maslahat diperintahkan oleh Syariah dan seluruh yang Mafsadah dilarang oleh Syariah. Sebab, setiap kemaslahatan mempunyai tingkat. tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya. Dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatan.⁴⁶

Maslahah Mursalah menurut bahasa artinya kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Maslahah Mursalah yang dimaksud oleh ahli ushûl fiqh adalah :

إِنْ يُوجَدُ مَعْنَى يُشْعِرُ بِأَحْكَمِ مُنَاسِبٍ عَقْلًا وَلَا يُوجَدُ أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁴⁴ Ashshiddieqy, dan Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. 1, hlm. 305.

⁴⁵ Amir Syafiruddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 324.

⁴⁶ A Djajuli, *Kaidah Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. 2, hlm.27.

Artinya: “Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat”.⁴⁷

Al Maslahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *Al Maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemashlahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tertentu.

Secara mutlak *Maslahah Mursalah* diartikan oleh ahli *Ushûl Fiqh* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh Syari’, serta tidak ada dalil Syari’ yang menerangkan atau membatalkannya. *Maslahah* ini disebut mutlak sebab tidak terikat oleh dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan adanya penentuan pajak penghasilan, pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut dalam keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan namun belum di syariatkan hukumnya.⁴⁸

Dengan demikian di dalam hukum Islam terdapat dua macam kaidah. Yang pertama kaidah *Ushûl Fiqh* dan yang kedua kaidah kaidah *fiqh*. Kaidah *Ushûl Fiqh* yang ditemukan di dalam kitab-kitab *Ushûl Fiqh* di gunakan untuk mengeluarkan hukum (*Takhrîj al-ahkâm*) dari sumbernya baik Al-Qur’an ataupun

⁴⁷ Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih Satu & dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 1, hlm. 163.

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), cet. 2, hlm. 139.

Al Hadis. Yang kedua kaidah-kaidah *fikih* yaitu kaidah yang disimpulkan secara umum dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus kasus baru yang muncul, yang tidak jelas hukumnya di dalam Nash.⁴⁹

E. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Dasar hukum diberlakukanya *Maṣlahah Mursalah* ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukanya teori *Maṣlahah Mursalah* diantaranya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Q.S. al-Anbiya: 107).⁵⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Q.S. Yunus: 57).⁵¹

Kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan *Al- Maṣlahah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlahah* yang mendapatkan pengakuan syara’

⁴⁹ A Djajuli, *Kaidah Kaidah Fiqih*, hlm.,4.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan: New Cordova* (Bandung: Syamsil Qur'an, 2012), Q.S.al-Anbiya (21): 107.

⁵¹ Ibid., hlm. 57.

saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia disetiap masa dan tempat akan terabaikan.⁵²

F. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

1. *Maslahah* itu harus hakikat bukan dugaan. *Ahlul hilli wal aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu untuk membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.
2. *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
3. *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang dituju oleh Syar'i. *Maslahah* tersebut harus *Maslahah* yang didatangkan oleh Syar'i. Jika tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya maka *Maslahah* tersebut tidak sejalan dengan yang dituju oleh islam dan tidak dapat dikatakan *Maslahah*.
4. *Maslahah* itu bukan *Maslahah* yang tidak benar. Dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah.⁵³

Imam Malik adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil *Maslahah Mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat:

1. Adanya persesuaian antara *Maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan tujuan Syari'ah (*Maqashid As- Syari'ah*).

⁵² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* terjemahan. Moh Zuhri Ahmad Qarib, (Semarang:Toha Putra Group,1994), hm.118

⁵³ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), cet. 2, hlm. 137-138.

2. *Maslahah* itu harus masuk Akal (*Rationable*), mempunyai sifat sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan diterima
3. Penggunaan dalil *Maslahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*Rafu Haraj Lazim*). Dalam pengertian, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.⁵⁴

G. Objek *Maslahah Mursalah*

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lapangan *Maslahah Mursalah* selain berlandaskan pada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. dengan demikian, segi ibadah tidak terasuk dalam lapangan tersebut.⁵⁵

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *Maslahah Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatannya melalui suatu *ih'tiyar*. Juga difokuskan pada hal-ha yang tidak di

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), cet.9, hlm. 454.

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), cet, hlm. 117

dapatkan adanya *Ijma'* dan *Qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁵⁶

H. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

1. Dari segi ada tidaknya kesaksian Syara' (*Syâhdah asyari*) terhadapnya baik kesaksiannya mengakui/melegitimasi sebagai *Al Maslahah* ataupun tidak.

Jumhur ulama membaginya ke dalam tiga bagian:

- a. *Al Maslahah* yang terdapat kesaksian Syara' dalam mengakui keberadaannya.

Al Maslahah dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *Al Qiyâs* (analogi). *Maslahah* ini biasa disebut dengan *Al Maslahah Al Mu'tabarah*. semua ulama sepakat *Al Maslahah* ini merupakan Hujjah (landasan hukum). seperti contoh keharaman perasan kurma yang memabukan yang tidak terdapat *nash-nya* kepada keharaman meminum perahan anggur yang memabukan yang terdapat *nash-nya* di dalam Al-Qur'an dan Sunnah⁵⁷

- b. *Al Maslahah* yang terdapat dalam kesaksian Syara' dalam mengakui keberadaannya

Al Maslahah kedua ini adalah bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena ia bertentangan dengan *Nash*. Bentuk *Maslahah* yang kedua ini biasa disebut dengan *Al-Maslahah al-mulghâh*.

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 118

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet.2, hlm. 207.

Sebagai contoh: pada zaman dahulu seorang ulama pernah mengeluarkan fatwa, bahwa terhadap seorang raja yang kaya yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan maka dikenakan kifarat puasa dua bulan berturut turut, tanpa boleh memilih antara memerdekakan budak atau puasa berturut turut atau memberi makan enam puluh orang miskin.

Dasar pemikirannya adalah agar memberikan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah. Jika raja yang kaya tersebut boleh memilih antara memberi makan 60 orang miskin atas memerdekakan budak, tentu ia akan mudah untuk melakukannya karena ia kaya dan ini tidak memberikan efek jera kepadanya. Jika hukumannya berpuasa selama dua bulan berturut turut tentu ia akan kewalahan melakukannya dan diharapkan dapat memberikan efek jera dan tidak mengulangnya lagi.

Bentuk fatwa seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Syara' dan berarti mengubah ketentuan hukum Syara' berdasarkan nalar murni. Jika sekiranya ketentuan Syara' membenarkan pola penetapan seperti ini, maka tentulah Rasulullah menetapkan hukum dengan pola yang sama.⁵⁸

- c. *Al Maslahah* yang tidak dapat kesaksian Syara' baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *Nash* tertentu

⁵⁸ *Ibid*, cet.2 hlm. 208.

1) *Al Maslahah al-gharibah*

Yaitu *Maslahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian Syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun menolaknya. dalam kenyataannya *Maslahah* bentuk ini hanya ada dalam teori tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁹

2) *Al Maslahah al mulâ'imah*

Yaitu *Al Maslahah* yang meskipun terdapat didalam *Nash* yang mengakuinya namun sejalan dengan tujuan Syara' dalam lingkup yang umum (*al-ushûl al-khamsah*). Tujuan Syara' dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Al- Quran, hadis dan *al-Ijmâ Maslahah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *Maslahah Mursalah*.⁶⁰

2. Dari segi kekuatannya sebagai Hujjah dalam menetapkan hukum:

a. *Maslahah Dharuriyah*

Dharuriyah adalah perkara-perakara yanag menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalela kerusakan, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, cet.2 hlm. 209.

⁶⁰ *Ibid*, cet.2 hlm. 209-210.

⁶¹ Chaerul Syafiruddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 327.

Maslahah Dharuriyah juga berarti kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika salah satu prinsip dari yang lima tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat *dharuri*. Dan segala sesuatu usaha atau tindakan yang secara langsung menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena Allah melarangnya. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁶²

b. *Maslahah Hajiyyah*

Maslahah Hajiyyah adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*). Tetapi secara tidak langsung memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah Hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung

⁶² Amir Syafiruddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 327.

menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan. Contoh *Maslahah hajiyyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, maka untuk kelangsungan hidup, mengasah otak sepenuhnya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *Maslahah* dalam tingkat haji.

c. *Maslahah Tahsiniyah*

Tahsiniyah Maslahah adalah *Maslahah* yang kebutuhan manusia kepadanya tidak sampai tingkat *Dharuri*, juga tidak sampai tingkat *Haji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *Maslahah* tersebut, secara berurutan secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. yang kuat adalah *Maslahah Dharuriyah*, kemudian di bawahnya adalah *Maslahah hajiyyah* dan berikutnya *Maslahah Tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: Agama, jiwa, akal keturunan dan harta.

3. Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *Maslahah* itu disebut juga dengan munasib atau keserasian *masalahah* dengan tujuan hukum. Terbagi menjadi 3:

a. Masalah Al-Mutabarah

AlMaslahah yang telah diakui oleh Syariah dan telah ditetapkan ketentuan ketentuan hukum untuk merealisasikan. Contohnya ijtihad untuk memelihara agama, diwajibkan hukum *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

b. Masalah Al-Mulgoh

Sesuatu yang dianggap Masalah namun bertentangan dengan ketentuan Syariah. Misalnya pembagian waris 1:1 antara laki laki dan perempuan yang dianggap untuk kemaslahatan, namun hal ini bertentangan dengan ketentuan Syariah dalam hal ini Surah An-Nisaa ayat 11. Yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu berarti apa yang dianggap Masalah itu bukan Masalah disisi Allah.

c. Masalah Al Mursalah

Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya ini *Al Maslahah ini Maslahah* muamalah yang belum ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya. Contohnya undang-undang mengenai lalu lintas. Tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun hal ini sejalan dengan tujuan Syariah dalam hal ini

memelihara jiwa dan harta.⁶³

4. Dilihat dari segi kandungan Masalahah, Para Ulama Ushûl Fiqh membaginya kepada

- a. Masalahah Al Ammah

Yaitu kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang merusak 'aqidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak.

- b. Masalahah Al Khâshshah

Yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini jarang sekali. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan (hilang atau maqfud). Pentingnya pembagaian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan dua kemaslahatan ini maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan umum.

5. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya Masalahah, menurut Muhammad Musthafa Al Syalabi, guru besar Ushûl Fiqh di Universitas al Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:

⁶³ Satria Effendi M Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 7, hlm.136.

a. Masalah al Tsâbitahah

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

b. Masalah al Mutaghayyirah

Kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lain. Perlunya pembagian ini menurut Musthafa Al Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.⁶⁴

I. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Dalam Kehujjahan *Maslahah Mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama Ushul di antaranya:

1. *Maslahah Mursalah* tidak bisa menjadi hujjah/ dalil menurut menurut Ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyyah dan sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing Home, 1996), cet. 1, hlm., 116

Hajib dan Ahli Zahir.⁶⁵

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka:

- a. *Maslahah* ada yang dibenarkan oleh Syara' atau hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan.
 - b. Memandang *Maslahah Mursalah* sebagai Hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih masalah.
 - c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Artinya jika kita memandang *Maslahah Mursalah* sebagai Hujjah secara tidak langsung kita menganggap Al- Qur'an belum lengkap dan sempurna. Memandang *Maslahah Mursalah* sebagai Hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum di suatu daerah karena perbedaan situasi dan kondisi.
2. *Maslahah Mursalah* dapat menjadi Hujjah / dalil menurut Ulama Malikiyah dan Hanabillah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama *fikih* yang paling banyak dan paling luas menerapkannya. Menurut mereka *Maslahah Mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *Qiyâs*.⁶⁶ selain digunakan oleh penganut madzhab ini, *Maslahah Mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non madzhab sebagaimana yang disampaikan oleh Al Syatibi dalam kitab al-

⁶⁵ Chaerul.Umam dkk, *Ushul fiqh 1*, hlm. 141.

⁶⁶ Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh 1*, cet 1. hlm. 116.

Istishan. Juga digunakan oleh kalangan ulama non Maliki seperti diutarakan oleh Ibnu Qudomah, Al-Raji, al- Ghazali dalam kitabnya.⁶⁷

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka yaitu:

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *Maslahah Mursalah*
- b. Adanya *Maslahah* sesuai dengan *Maqasid as-Syari* (tujuan-tujuan Syar'i) artinya dengan mengambil *maslahah* sama dengan merealisasikan *Maqasid as-Syari*. Sedangkan mengesampingkan *Maslahah* berarti mengesampingkan *Maqasid as-Syari*.
- c. Seandainya *Maslahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *Maslahah* selama berada dalam konteks *Maslahah* Syar'iyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.⁶⁸

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 335-336.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, cet.9*, hlm. 455-456.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar.

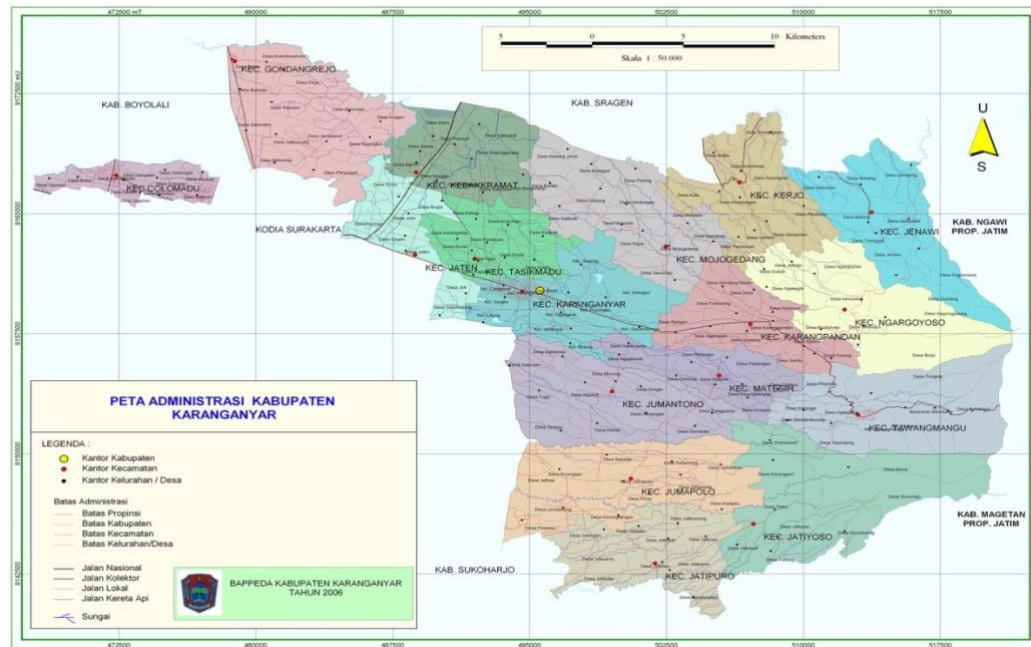
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat dari garis bujur dan garis lintang, Kabupaten Karanganyar terletak antara 110°40”–110°70” Bujur Timur dan 7°28” - 7°46” Lintang Selatan Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22°–31°.

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- b. Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo
- d. Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali¹

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri dari bermacam lahan. Berikut adalah tabel luas lahan tersebut (dalam satuan Ha). Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan yaitu : kecamatan Jatipuro, Jatoyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo, Jenawi.

¹ Kab. Karanganyar, <https://www.karanganyarkab.go.id/20110107/geografi/> diakses: 23/09/2020 pukul 22.00 WIB

Tabel 1:1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Karanganyar.²

B. Demografi

1. Kependudukan

Berdasarkan data dari dinas pendudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017, Kabupaten Karanganyar berpenduduk 871596 jiwa yang terdiri dari 430975 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 440621 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan yaitu : Kecamatan Jatiyoso, Jatiyoso, Jumapolo, Jumanjolo, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso,

² Ibid

Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo, Jenawi.

Tabel 1:2 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Karanganyar :³

Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
	2017	2017	2017	
Kabupaten Karanganyar	430975	440621	871596	1126
Jatipuro	14319	14196	28516	706
Jatiyoso	18233	18230	36464	543
Jumapolo	18012	17728	35739	642
Jumantono	20870	21349	42219	788
Matesih	19918	20383	40300	1534
Tawangmangu	22243	22590	44834	640
Ngargoyoso	16136	16520	32656	500
Karangpandan	19609	20118	39727	1165
Karanganyar	39530	40718	80247	1865
Tasikmadu	29626	30802	60428	2190
Jaten	41425	42721	84145	3294
Colomadu	39780	41033	80812	5166
Gondangrejo	39560	40185	79745	1404
Kebakkramat	31027	31969	62996	1728
Mojogedang	30846	31310	62156	1166
Kerjo	16979	17398	34377	734
Jenawi	12863	13371	26234	468

³ Badan Statistik Kabupaten Karanganyar, <https://karanganyarkab.bps.go.id/>, diakses: 24/09/2020 pukul 22.14 WIB.

2. Agama

Ada 5 Agama Keyakinan yang dianut masyarakat di Kabupaten Karanganyar cukup beragam diantaranya, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha.

Tabel 1:3 Jumlah Agama Keyakinan di Kabupaten Karanganyar.⁴

Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa)				
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
	2019	2019	2019	2019	2019
Kabupaten Karanganyar	843207	20908	15838	3643	289
Jatipuro	28024	246	199	0	47
Jatiyoso	35767	27	0	0	0
Jumapolo	41724	361	3088	14	17
Jumantono	48932	236	57	2	6
Matesih	48353	368	174	0	33
Tawangmangu	42938	679	356	50	19
Ngargoyoso	32364	15	302	716	0
Karangpandan	41550	955	255	9	1
Karanganyar	75908	2548	2291	43	3
Tasikmadu	54227	659	709	25	8
Jaten	68230	3854	2650	74	27
Colomadu	70573	5533	3704	0	52
Gondangrejo	65490	2963	435	3	6
Kebakkramat	56811	1297	1115	5	14
Mojogedang	70028	638	207	237	0
Kerjo	39350	431	170	0	49
Jenawi	22938	98	126	2465	7

⁴ Badan Statistik Kabupaten Karanganyar, <https://karanganyarkab.bps.go.id/>, diakses: 24/09/2020 pukul 22.30 WIB.

3. Pedagang Sate Anjing yang Bersedia Beralih Usaha

Dari Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang melarang pedagang olahan daging anjing berjualan, menyebabkan pedagang beralih profesi atau usaha. berikut nama-nama pedagang yang beralih usaha;

Tabel 1:4 Daftar Pedagang Sate Anjing Yang Bersedia Beralih Usaha :⁵

NO	NAMA	ALAMAT	LAMA USAHA
1	Stefanus Susanto	Mojorejo RT 11/5 Kedawung Jumapolo	10 th
2	Fransiskus Maryadi	Mojorejo RT 10/5 Kedawung Jumapolo	19 th
3	Mariyah	Karangbangun Rt 1/6 Karangbangun Jumapolo	3 th
4	Sugino	Badran Rt 1/9 Jumapolo	15 th
5	Gunanto	Karangbangun Rt 1/7 Karangbangun Jumapolo	32 th
6	Sukadi	Ngemplak Rt 1/1 Sringin Jumantono	5 th
7	Paidi	Selokajang Rt 2/16 Wukirsawit Jatiyoso	6 th
8	Sadi	Dumpul Rt 1/5 Sumberrejo Kerjo	10 th
9	Bu Lilik	Dumpul Rt 1/5 Sumberrejo Kerjo	5 th
10	Sutarni	Dersono Rt 1/1 Mojogedang	49 th
11	Paimin	Pendem Rt 3/1/Mojogedang	5 th
12	Wakidi	Benowo Rt 1/08 Ngringo Jaten	5 th
13	Warso Pawiro	Mendalan 1/5 Koripan Matesih	
14	Manto Wiratmo	Oro Oro tengah 3/2 Triyagan Mojolaban SKH	10 th
15	Pino Atmo wiyono	Mranggen 2/11 Matesih	39 th
16	Pitut Tri Haryono	Ngijo Kulon Rt 05/01 Ngijo Tasikmadu	5 th

⁵ Dokumen BAZNAS Kabupaten Karanganyar, 8 Juni 2020.

17	Karpet Handoko	Nglano Rt 12/05 Ngijo tasikmadu	19 th
18	Keman Darso Suwito	Wonolopo RT 01/02 Wonolopo Tasikmadu	48 th
19	Indro / Rani	Pingin Rt 01/11 Macanan Kebakkramat	40 th
20	Gino	Gonilan Rt 02/04 Pabelan Kartosuro	10 th
21	Sarbini	Duwet Rt 01/10 Ngasem Colomadu	25 th
22	Gutoro	Pucung Rt 02/9 Bolon Colomadu	5 th
23	Sugito	Kayuapak Rt 01/06 Wonolopo Tasikmadu	5 th
24	Suparno	Candi Rt 06/07 Buntar Mojogedng	3 th
25	Haryono	Plesungan Raya Rt 02/02 Plesungan gondangrejo	10 th
26	Raji	Kepuh Rt 02/06 Karanturi Gondangrejo	34 th
27	Katino	Dadapan Rt 06/07 Jatikuwung Gondangrejo	10 th
28	Paryono	Nilorejo Rt 01/04 jetis Jaten	3 th
29	Suparmi	Kebak Jetis R 01/09 Nangsri Kebakkramat	34 th
30	Bambang Widodo	Kebak RT 03/04 Kebakkramat	14 th
31	Samidi	Brujul Rt 03/07 Jaten	2 th
32	Suroso	Sorobaon RT 01/03 Jati Jaten	5 th
33	Awan Sunarwan	Tengklik Rt 08/04 Kedawung Jumpolo	3 th
34	Sumadi Raharjo	Ngegot Rt 04/12 Selokaton Gondangrejo	17 th

Peneliti mengambil sampel 5 pedagang yang siap beralih profesi, diantaranya Gino/Sri Partini sudah berdagang olahan daging anjing selama 10 tahun. Stefanus Susanto Sudah berdagang olahan daging anjing selama 10 tahun, Fransiskus Maryadi berdagang olahan daging anjing selama 19 tahun, Gunannto berdagang olahan daging anjing selama 32 tahun. Keman Darso Suwito dan Slamet putranya, Berjualan olahan daging anjing selama 48 tahun.

kondisi setelah beralih profesi pedagang mengalami kerugian dan menurunnya angka penghasilan tiap harinya. Dengan adanya pemberian dana atau

bantuan modal dari Bupati Karanganyar yang berjumlah Rp. 5.000.000,- diharapkan bisa beralih profesi yang baik. walaupun sudah berganti profesi pedagang mengalami penurunan pemasukan yang drastis, jauh dari ketika masih berdagang olahan daging anjing dulu.

C. Data Dampak Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 Tentang Pedagang Olahan Daging Anjing Yang Beralih Profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

Di Kabupaten Karanganyar terdapat penjual olahan daging anjing yang berjumlah 34 pedagang yang siap beralih profesi dan sudah mendapatkan bantuan modal sebesar Rp.5.000.000,- untuk memulai usaha baru, yang mana dulunya semua murni berjualan olahan daging anjing.⁶ Hal tersebut menjadi sorotan Dinas Perikanan dan Peternakan dan Bupati Karanganyar karena faktor utama mempengaruhi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Olahan daging anjing ini tidak layak konsumsi baik porsi besar maupun kecil karena menyebabkan rabies serta Zoonosis, jikalau hal ini dibiarkan maka kestabilan pangan dan kesehatan tidak baik bagi manusia sendiri. Dengan adanya masalah tersebut Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaksanaan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) yang tersedia bagi masyarakat, dan ;

⁶ Dokumen, Baznas Kabupaten Karanganyar, 8 Juni 2020, 10.00 WIB.

2. Pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan.⁷

Juliyatmono meminta kepada semua penjual daging anjing itu untuk beralih profesi lain, Harapannya dengan bantuan modal Rp.5.000.000,- Juta bantuan dana langsung itu, diharapkan menjadi modal untuk beralih ke profesi lainnya seperti menjual bakso, sate ayam, sate kambing, rica-rica enthok, hingga penjual angkringan. *"Untuk beralih ke profesi yang lebih baik, kita berikan bantuan modal masing-masing senilai Rp 5 juta,"* sebutnya. Selain memberikan bantuan modal, Juliyatmono juga berjanji akan memberikan pendampingan selama setengah tahun bagi pemilik warung olahan daging anjing yang mau beralih profesi. Tak hanya itu, ia juga menawarkan bantuan berbagai perlengkapan untuk memulai usaha yang baru. *"Mau jualan wedanggan angkringan nanti kita beri gerobak. Mau jual sate ayam, rica-rica menthok, sate kambing dan lainnya nanti kita beri tenda. Selama enam bulan akan saya pantau terus,"* ujarnya.⁸

Berikut ini peneliti deskripsikan hasil penelitian. Terdapat 5 orang pedagang sebagai narasumber yang sudah peneliti wawancarai, yaitu 1 orang

⁷ Peraturan Bupati Karanganyar No. 74 Tahun 2019 *Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Penjualan Produk Pangan Dari Hewan.*

⁸ Fajar Abrori, *Bupati Karanganyar Minta Penjual Kuliner Daging Anjing Ganti Profesi*, edisi. 22 Juni 2019, 23.00 WIB, Diperbarui 04 Juli 2019, 22.45 WIB, dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3994870/bupati-karanganyar-minta-penjual-kuliner-daging-anjing-ganti-profesi>, diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB.

berasal dari Kabupaten Sukoharjo yang berjualan di kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yaitu Gino/Sri Partini alamat Gonilan RT 02/04 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo ia sudah berdagang olahan daging anjing selama 10 tahun. Selain itu ada 4 (empat) pedagang yang berdomisili dan berjualan sebagai pedagang olahan daging anjing dulunya di Kabupaten Karanganyar, diantaranya Stefanus Susanto, alamat Mojorejo RT 11/5 Kedawung Jumapolo Karanganyar, umur 33 tahun, Fransiskus Maryadi, alamat Mojorejo RT 10/5 Kedawung Jumapolo Karanganyar, berdagang olahan daging anjing selama 19 tahun, Gunannto alamat Karangbangun RT 1/6 Karangbangun Jumapolo Karanganyar, berdagang olahan daging anjing selama 32 tahun. Keman Darso Suwito dan Slamet putranya, alamat Wonolopo RT 01/02 Wonolopo, Tasik Madu, Berjualan olahan daging anjing selama 48 tahun.

Narasmuber pertama adalah Bapak Stefanus Susanto, alamat Mojorejo RT 11/5 Kedawung Jumapolo Karanganyar, umur 33 tahun, agama Nasrani, pendidikan terakhir SMA. Sudah berdagang olahan daging anjing selama 10 tahun ia berjualan di rumah atau membangun warung tepat di depan rumahnya. Warung buka di malam hari, daging anjing di warungnya diolah menjadi rica-rica, goreng dan ungkep. Paska adanya Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 tentang perdagangan olahan daging Anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini sangat berpengaruh terhadap penghasilannya, sebab sebelum adanya peraturan yang dikeluarkan oleh bupati Karanganyar ia mendapatkan hasil berdagang cukup

tinggi karena dihargai Rp. 20.000,- perporisi. Paska di keluarkan Peraturan Bupati itu ia mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- yang dimaksud untuk beralih profesi. Namun uang tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak cukup untuk beralih profesi. Sehingga ia beralih berjualan olahan mentok namun tidak berjalan dengan mulus lalu melanjutkan usaha sablon kaos dan rental alat outdoor.⁹ Peneliti menanyakan kepada narasumber mengenai apa dampak utama yang dirasakan pedagang dengan adanya peraturan Bupati tentang larangan berjualan olahan daging anjing. Karena yang sudah diketahui dari dokumen bahwa menjual olahan daging anjing sudah 10 tahun, tentu tidak hal mudah bagi narasumber untuk beralih profesi lain.

“piye ya mas (gimana ya mas), soalnya berjualan sudah lama. Dan penghasilan sehari-hari untuk makan yo itu, jadi disuruh pindah usaha awalnya ya kaget. Tapi tetep manut wae (nurut saja) mas soalnya ya dijanjikan bakal dapat pendampingan selama beralih usaha tapi nyatanya dari pihak pemerintah hanya sekedar omong tok mas (bilang saja).”

Setelah adanya peraturan dan himbauan langsung oleh Bupati Karanganyar. Karena tentu tidak hanya mengandalkan dana yang diberikan Bupati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat ini narasumber beralih usaha sablon dan penyewaan outdoor yang sebenarnya menjadi sampingan berjualan olahan daging anjing. Sekarang usaha tersebut menjadi mata pencarian setiap harinya, dan penghasilan didapat jauh dibawah saat berjualan olahan daging anjing.

⁹ Stefanus Susanto, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sablon dan rental alat outdoor, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2020, jam 09.00 WIB.

“Sebenarnya saya dari dulu sudah memiliki pekerjaan sampingan mas, sablon dan penyewaan outdoor. Lalu setelah adanya himbauan dari pemerintah saya beralih berjualan rica-rica dan sate kelinci, tapi tidak berjalan mulus. Penghasilan pun juga menurun drastis, tapi saya tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Saya ini orang pecinta alam sekali no ya tetap no. Jadi saya hanya menjalankan usaha dan penyewaan outdoor. ”

Narasumber kedua adalah Bapak Fransiskus Maryadi, alamat Mojorejo RT 10/5 Kedawung Jumapolo Karanganyar, pendidikan terakhir SD, agama Katolik. Berdagang olahan daging anjing selama 19 tahun ia berjualan di depan rumah. Warung dibuka dari jam 09.00 sampai olahan daging anjing habis. Penghasilan perbulan Rp.5.000.0000,- lebih. Paska dikeluarkan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 tentang perdagangan olahan daging Anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini ia diberi uang oleh Bupati agar beralih profesi sejumlah Rp. 5.000.000,- disisi lain penghasilannya menurun drastis karena ia hanya mengandalkan sawah yang hanya panen 3 atau 6 bulan sekali. Ia juga dibantu oleh bupati untuk melunasi biaya rumah sakit, atau jikalau ada hal yang dibutuhkan agar segera menghubungi Bupati langsung. Sekarang ia beralih profesi menjadi petani.¹⁰ Peneliti menanyakan alih profesi apa yang dilakukan narasumber setelah adanya larangan dan himbauan secara langsung oleh Bupati Karanganyar. Bahwa narasumber beralih usaha ayam bakar dan ayam goreng yang biasanya berjualan dari pagi sampai habisnya daging, disamping itu narasumber menggrap sawah yang penghasilan tidak sesering saat berjualan olahan daging anjing.

¹⁰ Fransiskus Maryadi, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sebagai petani, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2020, jam 11.00 WIB.

“aku wis gak dodolan daging guguk yo bar enek perintah kon tutup mas, sak iki aku dodolan ayam bakar iku karo ayam goreng. Dodoan awit isuk teko entekke daging ayam. La kangoo urip mbendinan aku yo neng sawah seng panen e ora pasti, kadang telong wuan pisan lan kadang enem wulan pisan. Nah dadi penghasilan sak iki dadi ga mesti mas mbien iso sedino nyekel duit. Sak iki yo ngene nunggu panen soal e daging ayam gak patek enek seng minat mas.” (saya sudah tidak berjualan daging anjing setelah adanya perintah untuk tutup itu mas, sekarang saya berjualan ayam bakar dan ayam goreng. Berjualan dari pagi hari sampai habisnya daging ayam. Kalau untuk hidup sehari-hari saya ke sawah yang panennya tidak pasti, kadang tiga bulan sekali kadang enam bukan sekali. Nah, jadi penghasilan sekarang tidak pasti mas dulu sehari biasa memegang uang. Sekarang ya begini menunggu panen soalnya daging ayam sedikit yang minat.

Setelah adanya peraturan dan larangan secara langsung oleh Bupati Karanganyar, narasumber diberikan sejumlah uang untuk modal usaha lain. Di samping itu narasumber diberikan uang untuk berobat, karena penghasilan hanya cukup untuk berdagang dan kebutuhan sehari-hari.

“Enek larangan dodolan daging guguk kae aku langsung pindah usaha mas, mergo yo wis dikek i duit pemerintah Rp. 5.000.000,- dadi aku manut, wong wis dibiayayi. Lan kanggo berobat aku di wenehi duit Rp.2.000.000,- mergo pas kae duitku mung cukup kanggo kebutuhan mbendino karo sangu anakku sekolah (Adanya larangan berjualan olahan daging anjing saya langsung pindah usaha mas, saya diberi bantuan pemerintah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk berali profesi, saya juga patuh terhadap perintah Bupati. Bantuan modal saya gunakan untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak saya yang sekolah dan waktu saya sakit, saya bilang ke pak bupati dan saya diberi Rp.2.000.000,- untuk berobat.”

Narasumber ketiga adalah Bapak Gunannto alamat Karangbangun RT 1/6 Karangbangun Jumapolo Karanganyar, pendidikan tidak sekolah, agama Kristen. Berdagang olahan daging anjing selama 32 tahun, tempat berjualan di rumah tanpa membuka warung, pembeli datang menghampiri ke rumah. Ia

menjual olahan rica-rica, goreng dan ungkep tersebut Rp. 4000,-/porsi yang dibungkus kecil-kecil. Paska dikeluarkan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 tentang perdagangan Olahan daging Anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ia mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dan selalu dipantau oleh Satpol PP, ia mengalami kerugian karena penghasilan mengalami penurunan yang cukup drastis, uang yang di berikan oleh bupati habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengikuti anjuran pemerintah dan beralih profesi menjadi petani yang penghasilannya tidak setiap hari.¹¹ Peneliti menanyakan apa yang sudah dilakukan pemerintah selama menetapkan larangan tersebut sehingga narasumber mau beralih profesi.

“kolo wingi naliko dipun dawuhi pak bupati babakan larangan sadean daging guguk kulo dipun wenehi arto kangge modal alih usaha ingkang jumlah ipun Rp. 5.000.000,- kulo tumbaske wedus kalih, pas kulo butuh arto wedusipun kulo sade trus kulo usaha tukang ngaritake sapi nipun tonggo. Kulo nderek dawu ipun pak bupati” (sewaktu dipanggil pak Bupati tentang larangan jual beli daging anjing diberi modal sebesar Rp. 5.000.000,- saya belikan kambing dapat 2 (dua), ketika kemarin saya butuh uang kambingnya saya jual kemudian saya beralih profesi sebagai pemelihara ternak tetangga (tukang pencari rumput). Masalah perintah saya patuh saja.)

Narasumber keempat adalah Alm.Bapak Gino/Ibu Sri Partini Alamat Gonilan RT 02/04 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo Pendidikan terakhir SD, Agama Islam. Berdagang olahan daging anjing selama 10 tahun dan sekarang sudah wafat, ia berjualan di Karanganyar tepatnya di Colomadu Karanganyar, warung

¹¹ Gunannto, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai pencari rumput sapi, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2020, jam 13.00 WIB.

buka dari jam 08.00-19.00 malam. Daging anjing diolah menjadi sate dan tongseng yang dijual Rp.10.000,-/porsi. Pasca dikeluarkan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 tentang perdagangan Olahan daging anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ia mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- yang digunakan untuk beralih profesi sebagai penjual olahan mentok. Namun tidak banyak menghasilkan atau penghasilan menurun drastis di banding berjualan olahan daging anjing, karena semula penghasilan perhari Rp.100.000,- menjadi tidak menentu. Sekarang ia berjualan makanan nasi telur, minuman dan mie instan di pinggir jalan raya Colomadu.¹² Peneliti menanyakan kondisi ekonomi keluarga dan usaha yang dilakukan pemerintah sesudah adanya larangan tersebut.

“dulu pas pemerintah kesini mengawasi usaha saya apakah sudah beralih atau belum, waktu itu bapak masih hidup. Pemerintah juga memberi arahan kalau daging anjing tidak baik untuk dikonsumsi, dan memberikan bantuan modal untuk beralih usaha sejumlah Rp. 5.000.000,-. Yo saya saya langsung berjualan olahan mentok dan ayam, saya nurut dengan perintah dari pemerintah, ketika usaha saya tidak lancar akan dibantu dan diberi beras.”

Narasmuber kelima adalah Bapak Keman Darso Suwito dan Bapak Slamet (putra bapak slamet yang meneruskan usahanya), Alamat Wonolopo RT 01/02 Wonolopo, Tasik Madu, Karanganyar, Pendidikan terakhir SD, Umur 41 tahun, agama Islam. Berjualan olahan daging anjing selama 48 tahun yang di pasok langsung dari Jawa Barat, daging anjing diolah menjadi rica-rica yang dihargai Rp.20.000,- per-posi dan warung tepat di depan rumah buka dari jam

¹² Sri Partini, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sebagai penjual rica-rica mentok dan makanan, *Wawancara Pribadi*, 13 September 2020, jam 10.00 WIB.

08.00 sampai olahan habis. Penghasilan perhari Rp.1.000.000,- dan penghasilan bersih Rp.500.000,-. Paska dikeluarkan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 tentang perdagangan olahan daging Anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ia mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- digunakan untuk beralih berjualan olahan daging babi, ia bersikukuh tidak ingin meninggalkan profesinya dan keluar dari Karanganyar. Sekarang ia berjualan olahan daging anjing dan babi disamping itu ia juga bertani.¹³ Peneliti menanyakan mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah dan usaha yang dijalankan narasumber setelah adanya peraturan serta larangan langsung dari Bupati Karanganyar.

“himbauan dari bupati tentang larangan itu saya ganti berjualan daging babi karena yang dilarang daging anjing saja. Satpol PP dan Dinas sudah memperingatkan dan juga mengancam untuk meninggalkan wilayah Karanganyar kulo (saya) tetap berjualan, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Ketika peneliti menanyakan mengenai omset yang didapatkan narasumber perharinya, narasumber menjelaskan bahwa penghasilan sangat menurun dan tidak segan untuk kembali berjualan olahan daging anjing lagi. Walaupun sudah ada peraturan yang melarangnya.

“tapi saya tidak takut dengan ancaman itu, karena ini usaha sudah turun-temurun, ini saja saya beralih usaha sebagai penjual olahan daging babi penghasilan juga tak seperti ketika usaha olahan daging anjing dulu. Saya akan tetap berjualan daging anjing kalau kondisi perekonomian terus menurun penghasilannya .”

¹³ Slamet, Pedagang olahan daging anjing yang beralih usaha sebagai penjual olahan daging babi, Wawancara Pribadi, 13 September 2020, jam 10.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Dampak merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar kepatuhan, dampak adalah efek total suatu tindakan hukum terhadap perilaku, entah itu positif atau negatif. Dampak mengacu pada perilaku, sementara perilaku terkadang bisa diukur secara kuantitatif.¹ Istilah dampak, seperti yang digunakan disini, mengandung arti perilaku yang secara kasual terkait dengan peraturan atau pemerintah, terlepas dari apa yang ada dalam benak si pembuat peraturan. Tetapi setidaknya dalam bahasa sehari-hari, ada satu model lain mengenai dampak positif atau efektivitas tertentu yang benar-benar bergantung pada tujuan atau maksud sebuah peraturan.²

Sistem hukum merupakan teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir friedman mengenai sistem hukum, Lawrence Meir friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasilnya tindakan penegakan hukum tergantung tiga unsur system

¹ Lawrence M. friedman, *Sistem Hukum Persepektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, 2013 hlm, 61-62.

² *Ibid* hlm, 64.

hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal culture).³

1. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum,

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan memberikan amanat kepada Dinas Perikanan dan Peternakan agar mengawasi, meneliti, dan pembinaan terkait olahan daging anjing serta satpol PP yang bertugas menjalankan perintah menertibkan usaha-usaha yang menyalahi aturan yang sudah termaktub dalam Peraturan Bupati. Peraturan sudah berjalan mulus, disisi lain para pedagang mengalami penurunan penghasilan dari peralihan usaha tersebut.

2. Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan

Subtansi atau isi dari suatu peraturan penting untuk di perjelas dan dipertegas, sebab peraturan yang jelas dan terstruktur akan memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat tentang hukum dan peraturan yang tentu akan membangun wawasan itu sendiri agar masyarakat atau sasaran peraturan dapat berjalan dengan baik terkait hukum atau peraturan yang akan mereka laksanakan. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan

³ Lawrence M. friedman , *The Legalsystem: A Ssocial Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation), 1975, hlm, 4-5.

Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan, masih perlu pemahaman mendalam bagi pedagang olahan daging anjing dan masyarakat agar mengetahui lebih dalam mengenai peraturan tersebut. Karena tentu pemahaman itu salah diartikan di lingkungan masyarakat, sebagai aparat daerah perlu memberikan dan mewadai pemahaman peraturan tersebut.

3. Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) dan dianut dalam suatu masyarakat.

Manusia merupakan makhluk sosial yang pasti akan sering berinteraksi dengan sesama, tentu interaksi atau hubungan tidak hanya dengan manusia saja tetapi dengan makhluk lain, yang tidak jarang interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum. Jadi, budaya hukum atau kepatuhan hukum akan timbul jika interaksi atau adanya himbauan dari orang lain dan juga budaya hukum ini biasanya tumbuh atau dipatuhi seiring perkembangan zaman. Itu sebabnya mengapa produk hukum harus menyesuaikan dengan manusia dan makhluk lainnya. Dengan adanya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan ini terlihat pedagang olahan daging anjing sudah banyak yang patuh terhadap peraturan tersebut dan sudah beralih usaha. Mereka sadar bahwa peraturan ini dibuat untuk memperbaiki tatanan

kehidupan terutama dalam kesehatan, di sisi masih ada yang berjualan daging babi sedangkan daging babi lebih bahaya dari daging anjing.⁴

Dampak yang ditimbulkan dari Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang perdagangan olahan daging Anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah untuk beralih profesi sebagai pedagang olahan daging anjing agar beralih usaha yang lebih layak dan memperhatikan kesehatan dari dagangan tersebut yang dijual ini menimbulkan dampak di bidang:

1. Ekonomi, dalam bidang ekonomi penutupan warung olahan daging anjing berpengaruh terhadap kestabilan pendapatan para pedagang. Merosotnya pendapatan dirasakan setiap pedagang yang beralih usaha karena minat pembeli yang kurang. Pendapatan yang sebulan lebih dari Rp.3.000.000,- dan perhari tentu mendapatkan penghasilan dari olehan daging anjing kini penghasilan menjadi tidak pasti.
2. Kesehatan, bahwa dalam bidang kesehatan daging anjing tidak layak konsumsi ujar Siti Sofiyah Kabid Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan (Disnakan). Pernyataan tersebut hadir karena dinas rutin mengecek anjing layak konsumsi atau tidak, dengan mengambil

⁴ Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 *Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner DiRumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan.*

sampel otak dicek oleh balai besar vetriner, hasil memang negatif tetapi ditakutkan mempengaruhi kesehatan konsumen.⁵

Tanggapan lain hadir dari Perwakilan Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) Angelina Pane, bahwa daging anjing tidak layak konsumsi karena anjing dapat menyebabkan penyakit rabies dan Zoonosis yang tentunya mempengaruhi kesehatan, di samping itu daging anjing hewan yang dilindungi tidak untuk di bantai ataupun disembelih.⁶ Pertimbangan lain daging anjing dijadikan konsumsi yakni mempengaruhi kelangsungan hidup manusia karena dalam hal ini manusia menjadi penentu perkembangan lingkungan yang sehat dan seimbang karena hubungan makhluk hidup dengan Tuhan serta makhluk hidup lainnya.

Maksud dan tujuan Perbub, bahwa peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaksanaan pengawasan Kesehatan Masyarakat Vetriner di Daerah. Dalam praktiknya Peraturan Bupati ini melarang para pelaku usaha untuk memperhatikan kesehatan vetriner terhadap pedagang olahan daging anjing yang marak di Kabupaten Karanganyar.

⁵ Sri Sumi Handayani, Solo Pos <https://www.solopos.com/semua-warung-daging-anjing-di-karanganyar-bakal-ditutup-999454>, diakses 15 November 2020 12.53

⁶ *Ibid.*

Dan bertujuan untuk menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal yang tersedia bagi masyarakat serta pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan hewan dan penyediaan pangan yang berasal dari hewan.⁷ Tujuan di berlakukannya peraturan ini adalah agar masyarakat memerhatikan makanan yang layak di konsumsi dan berdampak baik bagi kesehatan. Serta untuk menghindari penyakit-penyakit tertentu akibat kengonsumsi makanan yang tidak layak di konsumsi agar kesehatan terjamin. Selain itu, pelaku usaha dalam menyiapkan atau menyembelih hewan harus sesuai dengan standar kesehatan dan tidak asal dalam menyediakan bahan untuk dikonsumsi.

Larangan tersebut dikhususkan bagi setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan/pemotongan daging baik mentah atau olahan yang berasal dari hewan non pangan untuk tujuan konsumsi. Sebelum adanya larangan ini Karanganyar banyak ditemui para pedagang olahan daging anjing yang bebas memperdagangkan daganganya secara terang-terangan faktor tersebut membuat Bupati lebih memerhatikan kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan dan higiene sanitasidan kriteria hewan potong. Setelah adanya peraturan ini para pedagang meninggalkan profesinya sebagai pedagang olahan daging anjing dan beralih ke usaha yang lebih layak.

⁷ *Ibid.*

Sanksi yang akan diberikan pemerintah kepada pedagang olahan daging anjing yaitu berupa: Peringatan tertulis, Penutupan, Pencabutan Izin. Pedagang dilarang berjualan lagi karena para pedagang tidak memiliki izin dan bupati sudah melarang secara tertulis dalam Peraturan Bupati Karanganyar nomor 74 tahun 2019 tentang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di rumah potong hewan dan penjualan produk daging dari hewan.

Pelaporan ini timbul akibat keresahan masyarakat terhadap maraknya penjual olahan yang berasal dari daging anjing. Lalu pelaporan tadi diperimbangkan dan menjadi tolak ukur dari pembinaan yang dilakukan Bupati Karanganyar kepada pedagang olahan daging anjing agar tidak dilanjutkan lagi usahanya karena akan menimbulkan kerugian dari sisi kesehatan. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan Siti Sofiyah Kabid Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan (Disnakan). bahwa dalam bidang kesehatan daging anjing tidak layak konsumsi ujar Pernyataan tersebut hadir karena dinas rutin mengecek anjing layak konsumsi atau tidak, dengan mengambil sampel otak dicek oleh balai besar vetriner, hasil memang negatif tetapi ditakutkan mempengaruhi kesehatan konsumen.

B. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Jika membicarakan perubahan dalam masyarakat yang berorientasi kepada proses pembentukan hukum itu berarti mengkaji perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat yang berorientasi kepada proses pembentukan dan tujuan Hukum. Oleh karenanya objek pembahasan berfokus pada *An Engineering Interpretation* atau interpretasi terhadap adanya norma hukum sehingga fungsi hukum sebagai *social control* dan *social engineering* dapat terwujud.⁸

Pada dasarnya hukum diciptakan dengan tujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat. Walaupun para ahli berbeda pendapat tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli yang menyatakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga tujuan hukum untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan lainnya.⁹.

Maslahah atau kemaslahatan dikenal dalam ajaran *fikih* sebagai suatu prinsip dasar yang menjiwai seluruh kawasan ajaran tersebut yang dijabarkan dan diterapkan dalam bagian bagiannya secara terperinci. Mengenai ajaran *fikih* yang di ajarkan oleh Imam Ghazali r.a, Syatibi r.a dan Imam Amidi r.a bahwa menyimpulkan bahwa kemaslahatan berkisar pada dua hal pokok yaitu

⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. 2, hlm. 41.

⁹ Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 41.

mewujudkan manfaat atau kegunaan (*Jalbul Manfa'ah*) dan menghindarkan kemelaratan (*daf'i madharrah*).¹⁰

Seperti kaidah dalam *Ushûl Fiqh*

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفْسِدِ

Artinya “Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah ”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya “menolak Kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”¹¹ *Maslahah* *Maslahah* juga diartikan sebagai sesuatu yang dianggap *Maslahah*

Pada prinsipnya tujuan Syariah Islam yang dijabarkan secara terperinci oleh ulama dalam ajaran fikih (*Fikih Sosial*) ialah penataan hal Ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. Adapun lima tujuan prinsip dalam Syariah Islam (*Maqashid al-syariah*) yaitu memelihara Agama, Akal, Jiwa, Nasab dan Benda.¹²

Peraturan Bupati Karanganyar No.74 Tahun 2019 tentang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan penjualan produk pangan dari hewan. dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 terhadap perdagangan olahan

¹⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 148.

¹¹ Nashr Farid dkk, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), cet. 1, hlm. 21.

¹² Sahal, Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1994), hlm. 5.

daging anjing di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah merupakan upaya hukum yang diciptakan oleh pemerintah untuk melindungi kelangsungan hidup (*Hifdz Al-Nafs*) yang mana dalam Peraturan Bupati tersebut mengatur dan melindungi terhadap pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di rumah potong hewan dan penjualan produk daging dari hewan, terkhusus pada peredaran olahan daging anjing yang mengancam kesehatan. di samping itu olahan daging anjing banyak mengandung madharat bagi kesehatan dalam jangka waktu tertentu, seperti penyakit rabies serta zoonosis, selain itu daging anjing bukan merupakan makanan yang layak konsumsi.

Dalam teori *Maslahah Mursalah* ada 3 tingkatan yaitu : *Dharuriyat*, *Hajiyat*, *Tahsiniyat*. Dampak Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah merupakan *Maslahah* tingkat *Hajiyah* yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*). Tetapi secara tidak langsung memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia

Dampak dari Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang pengawasan kesehatan masyarakat vetriner di rumah potong hewan dan penjual produk daging dari hewan untuk menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal yang tersedia bagi masyarakat, pedoman bagi pelaku usaha

dalam pemotongan hewan dan penyediaan pangan yang berasal dari hewan dan pencegahan Zoonosis. Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan manfaat atau kegunaan (*Jalbul Manfa'ah*) karena dalam daging anjing sendiri banyak penyakit ataupun hewan ini bukan layak untuk konsumsi dan anjing bukan hewan pangan. Selain itu Peraturan Bupati ini merupakan upaya untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti melindungi jiwa para konsumen dan menghindarkan kemelaratan (*daf'i madharrah*).

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 secara langsung mengatur tentang pelarangan menjual olahan daging anjing dan para pedagang diminta untuk beralih usaha, dengan diberikan-nya bantuan modal sebesar Rp. 5.000.000,- pedagang memulai usaha baru yang mana usaha tersebut diharapkan menjamin kesehatan bagi masyarakat atau pembeli ketika dikonsumsi. Hal tersebut merupakan penjagaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) untuk melindungi dari kerusakan yang diakibatkan beredarnya olahan daging anjing di Karanganyar.

Dari hasil wawancara dengan pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi, ternyata masih ditemui pedagang yang salah paham dengan kebijakan yang diambil oleh Bupati. Akibatnya pedagang tersebut nekat berjualan olahan daging babi yang mana daging babi juga banyak madharatnya, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan Bupati. Walaupun

sudah beralih profesi, profesi tersebut tetap pada jalur yang tidak sesuai dengan yang diharapkan Bupati Karanganyar.

Jika di kaitkan dengan permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian penulis, maka termasuk dalam *Maslahah Tahsîniyah* yaitu *Maslahah* yang kebutuhan manusia kepadanya tidak sampai tingkat *Dharuri*, juga tidak sampai tingkat *Haji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsiniyah* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Jika di katikan dengan fokus penulis, maka dari perturan Bupati maupun dampaknya Peraturan Bupati ini sangat efektif dan mengandung masalah kebaikan baik bagi para pedagang maupun pembeli. Dalam rangka menjaga daerah kabupaten karanganyar agar bebas dari pedagang daging anjing. Selama peneliti melakukan penelitian peraturan ini sudah banyak para pedagang yang faham dan sudah beralih profesi yang lebih layak konsumsi.

Dalam penjagaan harta, dengan adanya peralihan profesi ini seseorang akan bangga dengan usahanya tanpa harus malu dengan apa yang menjadi profesinya. Selain itu pelarangan berdagang daging anjing ini mempengaruhi pendapatan setiap penjual. Hal tersebut jelas dari hasil wawancara dengan penjual olahan daging anjing sendiri. Berdasarkan tingkatan Tahsiniyat Peraturan Bupati ini sudah sesuai dengan tujuan syariat, dikarenakan dapat mendatangkan keindahan dan kesantunan.

Dampak positif yang dapat diambil dengan adanya Peraturan Bupati ini adalah tentang penjagaan jiwa (*Hifdz Al-Nafs*), keamanan pangan terjamin dalam melindungi Masyarakat bebas konsumsi olahan yang bukan termasuk pangan. Dampak negatif dengan adanya Peraturan Bupati yang mengatur para pedagang untuk beralih profesi ini adalah menurunnya perekonomian dalam perdagangan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan urian tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang Dampak Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan Daging Anjing yang beralih profesi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Mengakibatkan para pedagang mengalami penurunan pendapatan saat beralih profesi. Namun, disisi lain dengan adanya Peraturan Bupati ini pedagang olahan daging anjing semakin hari semakin menurun dan tujuan dibuatnya Peraturan Bupati akan berjalan dengan baik. Keberlangsungan manusia dan makhluk lainnya tetap seimbang.

Selanjutnya, peneliti menemukan seorang pedagang yang telah beralih usaha olahan daging anjing ke usaha olahan daging babi, hal ini tidak sesuai dengan yang menjadi maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati. Karena daging babi sendiri banyak madharatnya dalam kesehatan manusia jika konsumsi,

2. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Dampak Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 Terhadap Pedagang Olahan Daging Anjing yang beralih

profesi. Peraturan Bupati ini terdapat kemaslahatan didalamnya karena penjagaan didalamnya, mengkonsumsi daging anjing akan mempengaruhi kesehatan serta mencegah terjadinya penyakit rabies dan Zoonosis.

Peraturan ini mampu mengurangi perdagangan olahan daging anjing yang marak di Kabupaten Karanganyar yang sangat signifikan, akan tetapi masih ada pedagang yang telah berjanji akan beralih usaha tetapi usaha tersebut justru malah berjualan olahan daging babi hal tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati.

Sedangkan, permasalahan tersebut masuk kepada *Maslahah Hajiyyah* peraturan Bupati ini memiliki tujuan untuk melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) untuk melindungi dari kerusakan yang diakibatkan beredarnya olahan daging anjing di Karanganyar, selain itu dalam perlindungan harta (*hifzh al-mal*) pedagang diminta untuk beralih usaha, dengan diberikan-nya bantuan modal sebesar Rp. 5.000.000,- pedagang memulai usaha baru yang mana usaha tersebut diharapkan menjamin kesehatan bagi masyarakat atau pembeli ketika dikonsumsi.

B. SARAN

1. Untuk Pelaku Usaha

Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penyusun sampaikan diatas, maka penyusun akan memberikan saran yang diharapkan berguna dan berpengaruh baik bagi pedagang olahan daging anjing yang beralih profesi. Bahwa pemerintah membuat Peraturan Bupati ini untuk ditaati oleh rakyatnya, segala peraturan tidak akan dibuat kalau tidak menimbulkan masalah baru. Sehingga hadirnya peraturan ini untuk ditaati secara mutlak. Pelaku usaha selayaknya melihat baik buruknya jikalau terus menerus membuka usaha olahan daging anjing, karena jelas daging anjing tidak diperuntukan sebagai konsumsi manusia dan Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Karanganyar meneliti bahwa daging anjing bagi manusia menimbulkan penyakit serius seperti rabies dan zoonosis dalam jangka panjang. Kepada para pedagang daging anjing yang beralih profesi agar lebih sadar hukum dan mematuhi peraturan yang ada, karena peraturan yang diatur oleh Bupati karanganyar 74 Tahun 2019 dapat dipastikan adalah yang terbaik untuk berbagai pihak.

2. Untuk Pemerintah

Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penyusun sampaikan diatas, maka penyusun akan memberikan saran yang diharapkan berguna dan berpengaruh baik bagi pelaksanaan aturan kawasan bebas pedagang olahan daging anjing. Pemerintah sendiri memiliki keharusan

memberikan edukasi atau pelatihan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan seperti penutupan usaha bagi pedagang yang nekat dan tetap berjualan. Karena tidak banyak masyarakat yang paham mengenai peraturan atau larangan yang hanya tekstual, realisasi yang perlu di implementasikan kepada pedagang seharusnya diberi pemahaman lebih mendalam. Karena tentu timbul perilaku-prilaku yang tidak diharapkan, hal tersebut timbul karena sebab utama seperti di usiknya usaha yang lama dijalani dan menurunnya tingkat penghasilan pedagang sendiri.

DAFTAR PUSAKA

Buku :

- Abd al-Rahman, Jamāl al-Dīn Abu Firaj, bin ‘Alī bin Muhammad al-Jaūzī, Zād al-Masīr *Ulum al-Tafsīr*, Juz III, (Dār al-Kitāb al-Arabī-1422 H).
- Abdul, Maman Djaliel (ed), *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung; Pustaka Setia, 2010.
- Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- al-Husain, Abu, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisāburi, *Sahih Muslim*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H).
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 2005).
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- al-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Darwis, (Jakarta:Darrus Sunnah, 2013).
- al-Utsaimin, Muhammad bin Ṣālih, *Tafsīr al-Qur’an al-Karīm Surah al-Kahfī terj. Abu Abdirahman bin Ṭayyib, Tafsir al-Kahfī* (Cet. I: Jakarta; Pustaka al-Sunnah, 2005).
- Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asmawi, Jamal Ma’mur, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Asmawi, Jamal Ma’mur, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Chaerul, Umam dkk, *Ushul Fiqih 1 cet. 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Daqr, M. Nizar *Hidup Sehat Dan Bersih Ala Nabi* (Cet. III; Jakarta: PT. Himmah Pustaka, 2002 M).
- Departemen Negara RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Jakarta: Lautan Lestari, 2007.
- Djajuli A, *Kaidah Kaidah Fiqih cet. 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu & dua cet. 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012).

Effendi, Satria M Zein, *Ushul Fiqh cet. 7*, Jakarta: Kencana, 2017.

Farid, Nashr dkk, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009).

Farida Ai Siti, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011.

Farida, Ai Siti, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011).

Friedman , Lawrence Meir, *Sistem Hukum Persepektif Imu Sosial* Nusa Media, 2013.

Friedman, Lawrence M, *American Law an Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki (Jakarta : PT Tatanusa, 2001).

Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Persepektif Imu Social*, Nusa Media, 2013.

Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation), 1975.

Friedman, Lawrence Meir, *the legalsystem: A Ssocial Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Friedman, Lawrence M, *The Legalsystem: A Ssocial Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation), 1975.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1 cet, 1*, Ciputat: Logos Publishing Home, 1996.

Husaini Usman dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011).

Husaini Usman dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Junanto Subar, *Civic Education*, Sukoharjo: Fatba Perss, 2013.

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2008).

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh terjemahan. Moh Zuhri Ahmad Qarib*, (Semarang:Toha Putra Group,1994).
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014).
- Madaniy A. Malik, *Politik Berpayung Fiqh* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1994.
- Mannan Muhammad Abd, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993.
- Mannan, Muhammad Abd, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993).
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad Abu, Zahrah, *Ushul Fiqh cet.9*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rahman, Abd. Dahlan, *Ushul Fiqh, cet.2*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati : Jakarta, 2002. Hal 843-846.
- Ashshiddieqy, dan Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shihab, M.Qurais, *Dia Dimana Mana Tangan Tuhan Dibalik Setiap Penomena* (Cet. IV; Jakarta: PT. Lentera Hati, 1427 H/2006 M).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. ke-1*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Ad Affset, 1989.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

Syafiruddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Thalbah, Hisham, *Kemukjizatan Penciptaan Hewan Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis* (Cet, I; Bekasi: Pt Sapta Sentosa, 2008).

Tim penyusun, *'Hijrah Menuju Islam Kaffah'*, Cahaya Nabawiy, no. 163, 2017.

Umam, Chaerul dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh cet.2*, Semarang: Dina Utama, 2014.

Washil, Nashr Farid Muhammad W dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* Jakarta: Amzah, 2009.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh cet. 7*, Jakarta: Kencana, 2017

Internet

Abrori Fajar, *Bupati Karanganyar Minta Penjual Kuliner Daging Anjing Ganti Profesi*, edisi. 22 Juni 2019, 23.00 WIB, Diperbarui 04 Juli 2019, 22.45 WIB, dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3994870/bupati-karanganyar-minta-penjual-kuliner-daging-anjing-ganti-profesi>, diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB

Ahmad Rafiq, *Pedagang Daging Anjing Tolak Larangan Bupati Karang Anyar*, edisi. Kamis, 20 Juni, 2019 17:20 WIB, dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1216578/pedagang-daging-anjing-tolak-larangan-bupati-karanganyar>, diakses pada 11 Maret 2020, 13.30 WIB

Badan Statistik Kabupaten Karanganyar, <https://karanganyarkab.bps.go.id/>, diakses: 22.14 24/09/2020

Kab. Karangayar, <https://www.karanganyarkab.go.id/20110107/geografi/> diakses: 23/09/2020 pukul 22.00 WIB
 Sri Sumi Handayani, Solo Pos <https://www.solopos.com/semua-warung-daging-anjing-di-karanganyar-bakal-ditutup-999454>, diakses 15 November 2020 12.53 WIB.

Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat veteriner Di Rumah Potong Hewan Dan Penjualan Produk Daging Dari Hewan

Jurnal

Abādi, Abū al-Ṭayyib, *‘Aun al-Ma’būd Syarh Sunan Abū Dāwud*, (T.tp: Dār al-Fikr. T.th.), Vol. 10..

Abdurrahmān, Al-Hāfiz Muhammad ibn Abdurrahīm al-Mubārakfūri, *Tuhfat al-Ahwadī bi Syarh Jami’ al-Turmuzī*, (Beirut: Dār alFikr, t.th.) Vol. 4, h.500

Al-Suyūti, Al-Hāfiz Jalāluddīn, dalam Ahmad ibn Syu’aib Abu Abdurrahmān al-Nasā’i, *Sunan al-Nasā’i bi Syarh al-Hāfiz* Jalāluddīn alSuyūti wa Hāsyiyah al-Imām al-Sindi, Vol.4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930 M/1348 H)

Kandou Grace D., *Kebiasaan Makan Makanan Etnik Minahasa Di Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Maret – September 2009, Vol.03

Nashirudin Muh., *Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) tentang makanan Halal dan Haram (Kajian Ushul Fikih)*. Di terbitkan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. Al-Manahij Vol. X No.2, Desember 2016.

Nike Maya Manro & Nadia Yovani, *Menuju Indoesia Bebas Rabies 2020: Probem Instansi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Pubik di Bali*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, Vol. 07, No. 04 Desember 2018

Surri Pepie Grisna Vikar, *penyebaran rabies pada perdagangan anjing dalam penyutradaraan filem dikumenter investigasi ”Dog Meat Free”*, Institut Seni Yogyakarta 2019

Skripsi

Lirmalasari Juli Tri , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Di Kelurahan Karangasari Kecamatan Sukorejo Kota Belitar*, skripsi diterbitkan, HES, IAIN Tulungagung (Tulungagug) 2019

Lutfi Arsyad, *Azas Manfaat dalam Jual Beli Anjing tinjauan Hukum Islam*, skripsi diterbitkan, muamalah Fakultas Syariah STAIN Mataram, (Mataram), 2003.

Santriyo Dendi Bagus , *Praktik Jual Beli Olahan masakan Rica-rica Daging Anjing di Tinjau dari Persepektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di*

Warung Rica-rica P. Keperek, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, skripsi diterbitkan, HES, IAIN Tulungagung (Tulungagung) 2019

Wahyuddin Arsyad, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, skripsi diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka (Yogyakarta) 2016*

Desertasi

Agus Wiyono, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Olahan Berbahan Dasar Daging Anjing Di Kota Surakarta*, Desertasi diterbitkan Program Studi Megister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana UMS Surakarta, (Surakarta), 2019.

Dokumen

Dokumen, Baznas Kabupaten Karanganyar, 8 Juni 2020, 10.00 WIB.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Dua Sehati, 2012)

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan: New Cordova* (Bandung: Syamsil Qur'an, 2012), Q.S.al-Anbiya (21): 107.

Kementerian Agama RI, *Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*,

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 15 Juni 2020, 10.00 WIB

Wawancara

Fransiskus Maryadi, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai petani, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2020, jam 11.00 WIB.

Gunannto, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai pencari rumput sapi, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2020, jam 13.00 WIB.

Slamet, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai penjual olahan daging babi, *Wawancara Pribadi*, 13 September 2020, jam 10.00 WIB.

Sri Partini, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai penjuar ricaa-rica mentok dan makanan, *Wawancara Pribadi*, 13 September 2020, jam 10.00 WIB.

Stefanus Susanto, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sablon dan rental alat outdoor *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2020, jam 09.00 WIB.

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Lampiran 1

Nama, Alamat, Umur

1. Faktor apa saja yang menyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing
2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing
3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati
4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa
5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjualan apa
6. Dan berapa penghasilan sehari
7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja
8. Apakah ada dari konsumen yang complain sakit setelah memakan daging anjing
9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing
10. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari bahaya olahan daging anjing
11. Apa agama bapak, dan bagaimana menurut ajaran agama bapak apakah ada larangan berjualan berbahan daging anjing
12. Masakan apa saja yang bapak jual

13. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen

14. Berapakah harga per porsi makanan yang bapak/ibu jual

Lampiran 2

Nama : stefanus susanto

Alamat : mojorejo RT 11/5 kedawung jumapolo karanganyar

Umur : 33 tahun

Pendidikan : SMA

1. Faktor apa saja yang menyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing ?

jawaban : inisiatif saja mas disinikan banyak yang beragama nasrani, dan banyak yang suka kuliner daging anjing

2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing ?

jawaban : 10 tahun

3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati

jawaban : diatas UMR mas

4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa

jawaban : saya bukak malam hari mas

5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjualan apa

jawaban : ya gini mas sablon sama rentalan, sama jualan rica-rica mentok

6. Dan berapa penghasilan sehari

jawaban : menurun drastis mas, penghasilan tidak tetap kadang ada ya kadang juga sepi

7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja

jawaban : pembeli dari lokal sini dan kebanyakan dari luar daerah

8. Apakah ada dari konsumen yang complain sakit setelah memakan daging anjing

jawaban : tidak ada mas, malah ada yang buat obat gatal-gata, dan konsumsi sehari-hari sebagai lauk pauk, kalo pas hari-hari besar pesanan juga banyak

9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing

jawab : yaitu mas bantuan 5 juta rupiah untuk bealih usaha, sebenarnya juga kurang mas apalagi sekarang juga ada wabah corona gini

10. Apakah sudah menerima bantuan sebesar 5juta untuk beralih usaha

jawaban : sudah mas tapi ya gini walaupun alih usah pendapatan tidak seperti dulu, namanya juga usaha dari nol lagi ya susah

11. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari bahaya olahan daging anjing

jawaban : tidak mas dalam agama saja juga ada larangan

12. Agama bapak/ibu apa

jawaban : saya nasrani mas

13. Bapak ternak sendiri atau beli dari pedagang anjing

jawaban : saya beli dari tetangga sekitar mas, dan saya sembelih sendiri

14. Masakan apa saja yang bapak jual

jawaban :ya itu mas rica-ica, sate, goreng, ungkep

15. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen

jawab : goreng mas

16. Berapakah harga per porsi makanan yang bapak/ibu jual

jawab : 20.000 mas

17. Setelah adanya larangan bupati apakah bapak akan tetap nekat berjualan lagi

jawab : tidak mas, saya itu orang pecinta alam sekali no ya no

18. Apakah dari dinas/pemerintah sudah datang kesini untuk memantu dan mengawasi

jawab : sudah datang kesini dan mereka memberikan pengarahan-pengarahan juga

Lampiran 3

Nama : fransiskus maryadi

Alamat : mojorejo RT 10/5 kedawung jumapolo karanganyar

Pendidikan : SD

1. Faktor apa saja yang menyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing ?

jawaban : dulu itu saya coba-coba mas, ya julan jahe suhu dll, sama olahan daging anjing

2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing ?

jawaban : 19 tahunan mas

3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati

jawaban : bersih perbulan diatas 5jt mas

4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa

jawaban : saya buka dari jam 09.00 sampai habis mas

5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjualan apa

jawaban : sempat berjualan nasi kucing, ayam bakar, ayam goreng tapi tidak menguntungkan mas, kemudian saya beralih sebagai petani

6. Dan berapa penghasilan sehari

jawaban : menurun drastis mas, penghasilan tidak tetap saya memilih jadi petani mas alapun hasilnya juga gak seberapa

7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja

jawaban : pembeli dari luar daerah kebanyakan mas sini kan pinggir jalan otomatis banyak yang mampir di warung saya juga

8. Apakah ada dari konsumen yang komplain sakit setelah memakan daging anjing

jawaban : tidak ada mas, malah ada yang buat obat gatal-gatal, dan konsumsi sehari-hari sebagai lauk pauk, kalo pas hari-hari besar pesanan juga banyak

9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing

jawaban : yaitu mas bantuan 5 juta rupiah untuk bealih usaha, dan saya dulu juga sakit mas, kemudian saya meminta bantuan ke pak bupati dan diberi 2 juta untuk berobat

10. Apakah sudah menerima bantuan sebesar 5juta untuk beralih usaha

jawaban : sudah mas tapi ya gini walaupun alih usah pendapatan tidak seperti dulu, namanya juga usaha dari nol lagi ya susah

11. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari bahaya olahan daging anjing

jawaban : tidak mas dalam agama saja juga ada larangan

12. Agama bapak/ibu apa

jawaban : saya katolik mas

13. Bapak ternak sendiri atau beli dari pedagang anjing

jawaban : saya beli dari tetangga sekitar mas, dan saya sembelih sendiri

14. Masakan apa saja yang bapak jual

jawaban :ya itu mas rica-ica, sate, goreng, ungkep

15. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen

jawab : rica-rica mas

16. Berapakah harga per porsi makanan yang bapak/ibu jual

jawab : 18.000 mas

17. Setelah adanya larangan bupati apakah bapak akan tetap nekat berjualan lagi

jawab : tidak mas, saya manut dengan pemerintah walupun banyak dari temen-temen yang menyarankan untuk bukak kembali

18. Apakah dari dinas/pemerintah sudah datang kesini untuk memantu dan mengawasi

jawab : sudah datang kesini mas, satpol pp juga udah ngecek juga sama dari dinas

Lampiran 4

Nama : gunanto

Alamat : karangbangun RT 1/6 karangbangun jumapolo karanganyar

Pendidikan : tidak sekolah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing ?

jawaban : saya jualan itu udah lama kok mas, kadang itu ada warga yang mengantar anjing hidup-hidupan untuk dimasakin, ya saya masakin sama si istri

2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing ?

jawaban : 32 tahunan mas

3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati

jawaban : perhari tidak menentu 75.000 100.000, kadang ya 50.000

4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa

jawaban : saya buka dari jam 09.00 sampai habis mas

5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjualan apa

jawaban : dulunya bantuan dari pak bupati saya belikan kambing 2 mas kemudian saya jual karena saya juga butuh, dan sekarang saya juga ngpeni sapi milik orang mas, ya ngarit dll

6. Dan berapa penghasilan sehari

jawaban : tidak tentu mas, yang penting cukup

7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja

jawaban : pembeli dari lingkungan sini saja mas

8. Apakah ada dari konsumen yang komplain sakit setelah memakan daging anjing

jawaban : tidak ada mas, malah ada yang buat obat gatal-gatal kalo buat obat itu mricanya dibanyakin, sama buat lauk sehari-hari

9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing

jawaban : yaitu mas bantuan 5 juta rupiah untuk bealih usaha,

10. Apakah sudah menerima bantuan sebesar 5juta untuk beralih usaha

jawaban : sudah mas tapi ya gini walaupun alih usah pendapatan tidak seperti dulu,

11. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari bahaya olahan daging anjing

jawaban : tidak mas dalam agama saja juga ada larangan

12. Agama bapak/ibu apa

jawaban : saya kristiani mas

13. Bapak ternak sendiri atau beli dari pedagang anjing

jawaban : saya beli dari tetangga sekitar mas, dan saya sembelih sendiri, secara bersih

14. Masakan apa saja yang bapak jual

jawaban :ya itu mas rica-ica, goreng, ungkep

15. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen

jawab : rica-rica

16. Berapakah harga per porsi makanan yang bapak/ibu jual

jawab : 4.000 mas, saya bungkusin kecil-keci itu kok

17. Setelah adanya larangan bupati apakah bapak akan tetap nekat berjualan lagi

jawab : tidak mas, saya manut dengan pemerintah

18. Apakah dari dinas/pemerintah sudah datang kesini untuk memantu dan mengawasi

jawab : sudah datang kesini mas, satpol pp juga udah ngecek juga sama dari dinas

Lampiran 5

Nama : gino / sri partini

Alamat : gonilan RT 02/04 pabelan, kartasura, sukoharjo

Pendidikan : SD

1. Faktor apa saja yang menyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing ?

jawaban : dulu itu suami mas yang jualan saya ikut bantu-bantu, dan suami sudah meninggal udah 100hari mas

2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing ?

jawaban : 10 tahunan mas

3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati

jawaban : perhari tidak menentu 500.000 700.000

4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa

jawaban : saya buka dari jam 08.00 sampai jam 19.00 malam mas

5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjualan apa

jawaban : saya jualan rica-mentok sama ayam mas

6. Dan berapa penghasilan sehari

jawaban : 100.000 rb mas

7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja

jawaban : pembeli dari luar daerah mas, ini kan tempatnya juga strategis jalan Manahan-colomadu soalnya

8. Apakah ada dari konsumen yang komplain sakit setelah memakan daging anjing

jawaban : tidak ada mas, seama ini

9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing

jawaban : yaitu mas bantuan 5 juta rupiah untuk bealih usaha,

10. Apakah sudah menerima bantuan sebesar 5juta untuk beralih usaha

jawaban : sudah mas

11. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari bahaya olahan daging anjing

jawaban : mboten mas amargi geh mboten enten seng sakit niku

12. Agama bapak/ibu apa

jawaban : saya islam mas

13. Bapak ternak sendiri atau beli dari pedagang anjing

jawaban : saya dulu ada yang nyetori mas, juga di kasih beras juga tapi sekarang udah tidak lagi

14. Masakan apa saja yang bapak jual

jawaban : sate sama tongseng

15. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen

jawab : tongseng mas

16. Berapakah harga per porsi makanan yang bapak/ibu jual

ja/wab : 10.000 mas,

17. Setelah adanya larangan bupati apakah bapak akan tetap nekat berjualan lagi

jawab : tidak mas, mpon saya manut dengan pemerintah

18. Apakah dari dinas/pemerintah sudah datang kesini untuk memantu dan mengawasi

jawab : sudah datang kesini mas, satpol pp juga udah ngecek juga sama dari dinas

Lampiran 6

Nama : kemas darso suwito dan slamet putranya

Alamat : wonolopo RT 01/02 wonolopo, tasik madu, karanganyar

Pendidikan : SD

Umur : 41

1. Faktor apa saja yang menyebabkan bapak/ibu berjualan kuliner berbahan daging anjing ?

jawaban : saya hanya meneruskan usaha dari bapak saya mas, usaha turun temurun

2. Sudah beapa lama bapak/ibu bekerja sebagai pedagang kuliner berbahan daging anjing ?

jawaban : 48 tahunan mas

3. Berapa penghasilan perhari sebelum adanya larangan dari Bupati

jawaban : 1 juta pehari bersih 500.000 an mas

4. Bapak/ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa

jawaban : saya buka dari jam 08.30 sampai habis mas

5. Setelah adanya larangan Bupati mengenai larangan berjualan bapak/ibu berjualan apa

jawaban : saya jualan olahan babimas karena pak bupati hanya melarang jualan dari anjing saja,

6. Dan berapa penghasilan sehari

jawaban : tidak tentu mas, tidak seperti jualan daging anjing dulu

7. Selama ini para konsumen berasal darimana saja

jawaban : pembeli dari lingkungan sini saja mas kadang juga ada orang mampir

8. Apakah ada dari konsumen yang komplain sakit setelah memakan daging anjing

jawaban : tidak ada mas

9. Langkah apa saja yang sudah dilakukan aparat pemerintah, terhadap pelarangan jualan bebahan daging anjing

jawaban : yaitu mas bantuan 5 juta rupiah untuk beralih usaha, dulunya 500.000 pas ketemu pak bupati kemudian dari dinas kesini mengasih uang sisanya yaitu 4.500.000

10. Apakah sudah menerima bantuan sebesar 5 juta untuk beralih usaha

jawaban : sudah mas tapi ya gini walaupun alih usaha pendapatan tidak seperti dulu, lebih menjanjikan daging anjing mas

11. Apakah bapak/ibu tidak tahu bahaya dari olahan daging anjing

jawaban : tidak mas

12. Agama bapak/ibu apa

jawaban : saya islam mas

13. Bapak ternak sendiri atau beli dari pedagang anjing

jawaban : saya beli dari Jawa Barat diantar kesini mas

14. Masakan apa saja yang bapak jual

jawaban :ya itu mas rica-ica, goring, ungkep

15. Masakan apa saja yang paling digemari para konsumen

jawab : goreng

16. Berapakah harga per porsi makanan yang bapak/ibu jual

jawab : 20.000 mas,

17. Setelah adanya larangan bupati apakah bapak akan tetap nekat berjualan lagi

jawab : ya kalau tetap begini terus saya mau beralih lagi mas,

18. Apakah dari dinas/pemerintah sudah datang kesini untuk memantu dan mengawasi

jawab : sudah datang kesini mas, satpol pp dia bilang kalo mau ngusir saya usir saja, dan dari dinas juga sempat melerai kenapa dagang babi malahan, saya jawab la kan yang dilarang daging anjing bukan daging babi

Lampiran 1 : Wawancara dengan bapak Stefanus Susanto, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sablon dan rentalan alat outdoor *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2020, jam 09.00 WIB.



Lampiran 2 : Wawancara dengan Bapak Fransiskus Maryadi, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai petani, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2020, jam 11.00 WIB.

Lampiran 3 : Wawancara dengan Bapak Gunannto, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai pencari rumput sapi, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2020, jam 13.00 WIB.



Lampiran 4 : Wawancara dengan Ibu Sri Partini istri Alm. Bapak Gino, Pedagang olahan daging anjing yang beraih usaha sebagai penjual ricaa-rica mentok dan makanan, *Wawancara Pribadi*, 13 September 2020, jam 10.00 WIB.

Lampiran 5 : Foto Warung milik Ibu Sri Partini istri Alm. Bapak Gino,



Lampiran 6 : Foto Warung milik Stefanus Susanto

Lampiran 7 : Foto Warung milik Fransiskus Maryadi,



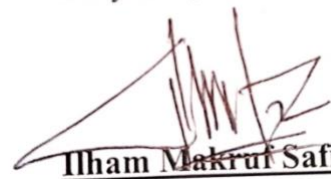
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ilham Makruf Safii
2. NIM : 162111329
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 23 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Sanggrahan 03/01, Denanyar, Tangen, Sragen
6. Nama Ayah : Alm. Wagimin
7. Nama Ibu : Ngadinem
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri Denanyar 01, Lulus Tahun 2010
 - b. MTs Miftachul Hikmah Tangen, Lulus Tahun 2013
 - c. MA NU Gesi, Lulus Tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 8 Oktober 2020

Penyusun,



Ilham Makruf Safii



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI RUMAH
POTONG HEWAN DAN PENJUALAN PRODUK DAGING DARI HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk olahan Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, maka perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner di Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan Pangan dan pencegahan Zoonosis maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap penjualan produk Pangan dari Hewan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Penjualan Produk Pangan dari Hewan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PENJUALAN PRODUK PANGAN DARI HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pangan.
8. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Hewan Pangan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
11. Hewan *Non* Pangan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya tidak boleh untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

12. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
13. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari Hewan ke manusia atau sebaliknya.
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Ruminansia Besar adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
16. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
17. Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.

18. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari *tarsus/karpus* ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*).
19. Daging adalah bagian dari otot *skeletal* karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
20. Daging Segar Dingin (*chilled*) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C.
21. Daging Segar Beku (*frozen*) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam *blast freezer* dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C.
22. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
23. Pemeriksaan *Ante-mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
24. Pemeriksaan *Post-mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.

25. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan Daging Hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
26. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
27. Penanganan Daging Hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
28. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
29. Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH dan/atau UPD berdasarkan rekomendasi dari Bupati yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
30. Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi.
31. Daerah Bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah.
32. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
33. Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan *ante-mortem*.

34. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaksanaan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) yang tersedia bagi masyarakat; dan
 - b. pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan Hewan dan penyediaan Pangan yang berasal dari Hewan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Pengawasan;
- b. Pembiayaan;
- c. Larangan;
- d. Sanksi Administrasi; dan
- e. Pelaporan.

Pasal 4

Kegiatan pengawasan Kesmavetdi RPH meliputi:

- a. penerapan Kesehatan Hewan;
- b. pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum disembelih (*ante-mortem inspection*);

- c. pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (*stunning*);
- d. pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau Karkas (*post-mortem inspection*); dan
- e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi.

Pasal 5

Kegiatan pengawasan penjualan produk Pangan dari Hewan meliputi:

- a. perizinan usaha;
- b. penerapan standar halal bagi produk pangan halal;
- c. memastikan asal Hewan merupakan Hewan Pangan yang diproduksi dengan memperhatikan aspek kesejahteraan Hewan dengan mempertimbangkan aspek Zoonosis dan keamanan Pangan; dan
- d. pemeriksaan tata cara penyiapan dan produksi Pangan.

Pasal 6

Kegiatan Pengawasan Kesmavet dilaksanakan pada :

- a. tempat budidaya;
- b. tempat produksi pangan asal hewan;
- c. tempat produksi produk hewan non pangan;
- d. tempat pengumpulan;
- e. tempat penyimpanan;
- f. tempat penjualan; dan
- g. pengangkutan.

BAB IV

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan Kesmavet dilaksanakan oleh pengawas Kesmavet.

(2) Dalam hal tertentu pengawasan Kesmavet dan penjualan produk pangan dari Hewan dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi peternakan;
- b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pangan;
- c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
- d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban;
- e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
- f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
- g. Dokter Hewan yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- h. unsur Perangkat Daerah lain yang terkait.

(4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap :
 - 1) unit usaha pangan segar asal Hewan;
 - 2) produk Hewan olahan untuk pangan yang berpotensi membawa resiko Zoonosis, dan
 - 3) produk Hewan Non Pangan baik segar maupun olahan;
- b. melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha Rumah Potong Hewan agar sesuai dengan standar dan kriteria Pemotongan dan Kesehatan Hewan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan Hewan;
- c. melakukan kajian aspek Zoonosis dan keamanan Pangan;

- d. melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha warung/restoran/rumah makan/katering yang menyajikan menu olahan yang berasal dari Hewan pangan;
- e. melakukan identifikasi jalur distribusi dan peredaran Hewan guna melakukan pengendalian dan pemberantasan penyakit Hewan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan memberikan rekomendasi penindakan bagi pelanggaran yang ditemukan pada saat pemeriksaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Kegiatan Pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditempatkan pada DPA Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan.
- (2) Sekretariat Kegiatan berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usaha penjualan/Pemotongan Daging baik mentah atau olahan yang berasal dari Hewan Non Pangan untuk tujuan konsumsi;

- b. melakukan kegiatan usaha Rumah Potong Hewan dan penjualan produk/olahan Hewan Pangan tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. menyelenggarakan Pemotongan Hewan tanpa memperhatikan aspek Kesejahteraan Hewan, Higiene Sanitasi dan kriteria Hewan Potong.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang mengedarkan dan/atau mendistribusikan Hewan *Non* Pangan untuk dikonsumsi dari/menuju ke Daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi Administrasi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Sementara Izin;
 - c. Penutupan;
 - d. Pencabutan Izin;
 - e. Denda Administrasi.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pengambilalihan/penyitaan barang;
 - c. Pemusnahan;
 - d. Denda Administrasi.
- (3) Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan secara bertahap dengan jeda antar sanksi paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dan pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan.
- (5) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Biaya pengawasan dan pemulihan ke kondisi ideal yang diharapkan;
 - b. Biaya kompensasi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat guna memenuhi asas keadilan masyarakat; dan
 - c. Menimbulkan aspek jera bagi pelaku.
- (6) Denda Administrasi disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan Pendapatan Daerah lainnya.
- (7) Pemanfaatan Denda Adminsitrase dapat dialokasikan bagi kegiatan:
 - a. Pemeriksaan Keamanan Pangan;
 - b. Pengendalian Zoonosis Hewan;
 - c. PengawasanKesmavet; dan
 - d. Pemulihan kondisi lingkungan.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan wajib melaporkan hasil pengawasan Kesmavet kepada Bupati.
- (2) Pembinaan terhadap Kesmavet dilaksanakan secara terpadu oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 5 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

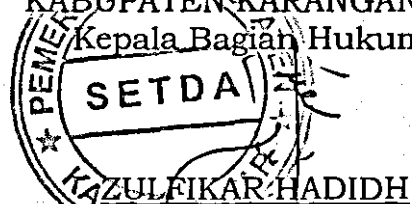
ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 747

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



NIP. 19750311 199903 1 009